

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE :
PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**



OLEH

SISKA ANGGRAINI

NIM: 18.2800.014

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE :
PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**



OLEH

**SISKA ANGGRAINI
NIM : 18.2800.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak.) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE :
PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana
(S.Tr.Ak)**

OLEH

SISKA ANGGRAINI

NIM : 18.2800.014

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah

Nama Mahasiswa : Siska Anggraini

NIM : 18.2800.014

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2108/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP: 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi
Penggajian pada Dinas Perdagangan Kota
Parepare: Perspektif Keuangan Syariah

Nama Mahasiswa : Siska Angraini

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.014

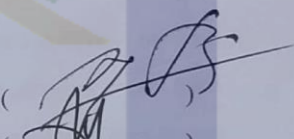
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

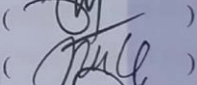
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2108/In.39.8/PP.00.9/7/2021


Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) ()

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekertaris) ()

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota) ()

An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota) ()

Mengetahui:


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197103062001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah”. Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak secara tulus dan ikhlas hati. Secara khusus dan istimewa penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, Kepada Ayah dan Ibu saya Jajang Ruhiyat dan Endang Wuryanti dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan, bimbingan, arahan, waktu, pikiran, serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga meyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani,S.Ag.,M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi S, S.E.,M.M. selaku Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Tim Penguji skripsi Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Ibu An Ras Try Astuti, M.E. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Yasin Soumena selaku Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
6. Seluruh Staff Pegawai dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk mengajari dan berbagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7. Bapak Prasetyo Catur.K, SH, M.Si. selaku Kepala Dinas beserta seluruh Staff dan Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare yang telah memberikan izin dan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan saya yang mendukung saya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikannya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 18 Desember 2022
24 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



Siska Anggraini
18.2800.014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siska Anggraini
NIM : 18.2800.014
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Karang, 2 Maret 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Desember 2022
24 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



Siska Anggraini
18.2800.014

ABSTRAK

Siska Anggraini. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Parepare*. Dibimbing oleh Bapak Zainal Said selaku pembimbing pertama dan Bapak Abdul Hamid selaku pendamping pembimbing.

Gaji merupakan salah satu bentuk pengendalian internal perusahaan, pengendalian atas gaji pegawai perlu dilakukan secara teliti agar informasi yang ada dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di Dinas Perdagangan Kota Parepare dan untuk Mengetahui implementasi Akuntansi Syariah dalam Penerapan Akuntansi Penggajian di Dinas Perdagangan Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

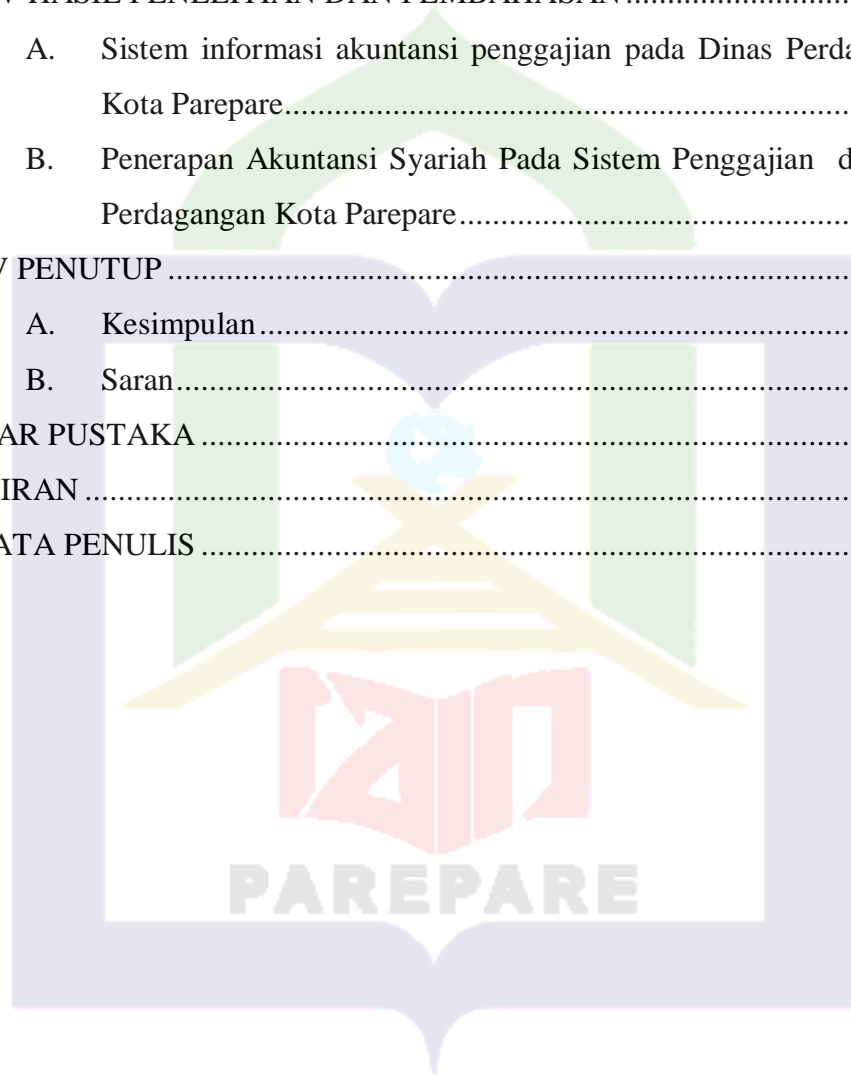
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare telah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 1) Adanya program pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare terkait penggajian dengan memberikan pelatihan kepada pegawai dalam menggunakan aplikasi sistem pengelolaan gaji. Kelompok target dalam program penggajian yaitu seluruh Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare sebanyak 42 orang. Sistem penggajian yang digunakan di Dinas Perdagangan Kota Parepare adalah Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penggunaan aplikasi ini untuk mengikuti anjuran dari kementerian dalam negeri tentang penggunaan aplikasi SIPD untuk seluruh badan pemerintah daerah 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerepan sistem informasi penggajian Dinas Perdagangan tetap menerapkan prinsip syariah yaitu pertanggungjawaban Dinas Peragangan Kota Parepare menerapkannya dengan membuat surat tanggungjawab mutlak yang dditanda tangani oleh Kepala Dinas , keadilan Dinas Perdagangan menerapkannya dengan memberikan gaji kepada pegawai sesuai dengan golongan gaji setiap pegawai, dan prinsip kebenaran yang dibuktikan berdasarkan wawancara dengan pegawai , jumlah gaji yang diterima sesuai dengan yang ada di tabel gaji pegawai..

Kata kunci : akuntansi syariah, penggajian, sistem

DAFTAR ISI

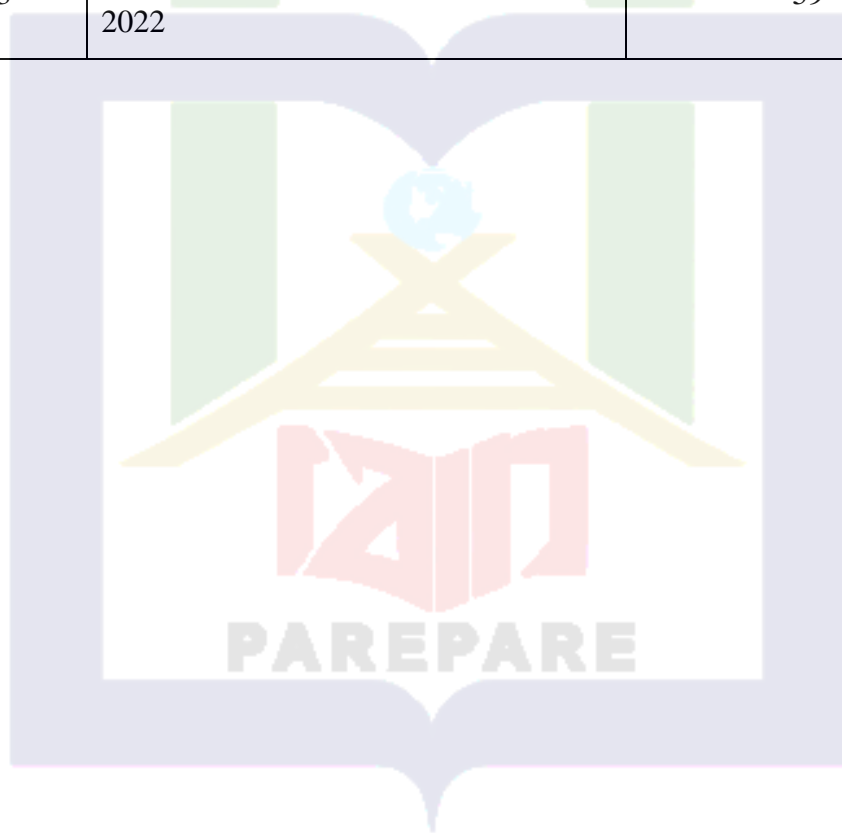
	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	37

D.	Jenis dan Sumber Data	37
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	38
F.	Uji Keabsahan Data.....	39
G.	Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare.....	42
B.	Penerapan Akuntansi Syariah Pada Sistem Penggajian di Dinas Perdagangan Kota Parepare.....	64
BAB V PENUTUP		79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN		84
BIODATA PENULIS		103



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tabel Anggaran Gaji Pegawai Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Parepare	44
4.2	Golongan Gaji Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare	55
4.3	Daftar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2022	59



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35
4.1	Tampilan Aplikasi SIPD	57
4.2	Siklus Gaji Dinas Perdagangan Kota Parepare	58
4.3	Surat Permintaan Pembayaran	61
4.4	Surat Perintah Membayar	62
4.5	Verifikasi SPP	63
4.6	Tampilan Awal SIPD	64
4.7	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak	67
4.8	Rekapitulasi Gaji Pergolongan	69



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	85
2	Berita Acara Perubahan Judul	88
3	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	89
4	Izin Penelitian dari Dinas Permodalan Kota Parepare	90
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	91
6	Surat Keterangan Wawancara	92
7	Daftar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2022	99
8	Dokumentasi	100
9	Biodata Penulis	103



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi di Indonesia kini sangatlah berkembang pesat. Bukan hanya melalui radio, televisi, majalah dan koran saja media masyarakat saat ini, namun juga terdapat media yang lebih maju yaitu komputer. Di dalam dunia bisnis, persaingan semakin ketat untuk saling bersaing satu dengan yang lain karena pesatnya perkembangan teknologi ini. Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan baik perusahaan kecil maupun yang berskala besar, bertaraf internasional, nasional maupun lokal mampu mengembangkan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh seluruh perusahaan, terutama bagi perusahaan yang sedang berkembang. Apalagi dengan adanya globalisasi yang mendorong persaingan ketat di antara perusahaan, sehingga para pengusaha harus mengelola perusahaannya dengan baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Perkembangan dunia usaha yang semakin luas saat ini menuntut adanya kebutuhan pengembangan sistem akuntansi baru untuk memenuhi kebutuhan informasi yang lebih baik. Kebutuhan sistem akuntansi ini ditandai dengan penggunaan komputer dalam perkembangan teknologi informasi.¹

Grande menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu alat yang termasuk kedalam bidang Teknologi Informasi dan Sistem (TI), yang dirancang untuk membantu dalam pengolahan dan pengendalian topik yang terkait

¹ George H. Bodnar, William S. Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi, Buku Satu* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 5-10.

dalam bidang ekonomi keuangan perusahaan.² Handojo, dkk. (2004) menyatakan bahwa tujuan pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah untuk menambah nilai bagi perusahaan, yaitu menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu, penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan pembagian, pengetahuan (*knowledge sharing*).³

Informasi juga diperlukan dalam mengkoordinasi, merencanakan, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha. Jadi, produk yang dihasilkan akan mengalami peningkatan karena adanya pemanfaatan informasi yang baik. Perusahaan akan sulit berkembang tanpa adanya informasi. Bahkan dengan informasi yang sangat cepat, akurat, tidak menyesatkan dan berkualitas dalam membuat strategi dan keputusan dalam perusahaan bisa meningkatkan kemajuan perusahaan. Pengendalian internal perusahaan merupakan salah satu fungsi utama dari sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi harus dapat menunjang pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan, sistem informasi akuntansi akan mencatat seluruh aktivitas perusahaan secara otomatis sehingga pimpinan perusahaan akan memperoleh laporan-laporan yang bermanfaat untuk menilai efisiensi perusahaan, menetapkan kebijakan-kebijakan dan mengambil keputusan.

² Grande, Elena Urquia, "The Impact of Accounting Information Systems (AIS) on Performance measures: Empirical evidence in Spanish SMEs1" . The International Journal of Digital Accounting Research. 11 (2) 2011. h. 25-43.

³ Handojo, Andreas., Maharsi, Sri., dan Aquaria Go Ornella, "Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi Atas Siklus Pembelian Dan Penjualan Pada CV.X" . Jurnal Informatika 5(2) 2004. h.86-94.

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu mengenai transaksi-transaksi keuangan perusahaan atau badan usaha lain serta penafsiran terhadap hasil kegiatannya.

Akuntansi saat ini merupakan bagian penting dari aktivitas manusia sehari-hari.⁴ Dan pada praktiknya, baik perorangan maupun lembaga bisnis atau perusahaan selalu membutuhkan informasi keuangan sehingga suatu entitas dapat memaparkan posisi keuangan dengan sangat jelas sehingga perencanaan pun dapat di lakukan secara tepat. Dan informasi keuangan secara detail dapat diperoleh melalui proses akhir dari Akuntansi. Pada umumnya, laporan keuangan digunakan oleh perusahaan berskala besar maupun berskala kecil untuk mengetahui perkembangan dan kelangsungan usaha perusahaan ke depan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan, penggabungan, pengikhtisaran semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya serta peristiwa penting yang terjadi di dalam perusahaan.

Akuntansi memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan. Berkembangnya kebutuhan informasi telah mendorong perkembangan akuntansi sebagai suatu sistem informasi, perubahan ini berkaitan erat dengan penerapan teknologi pengolahan data yang lebih efisien dan dapat mengolah informasi yang lebih banyak. Informasi menjadi sangat penting dalam suatu organisasi, suatu sistem yang kurang dalam memperoleh informasi akan

⁴ Fitria, Nola, "Aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan pada koperasi Kopma UGM". (Skripsi: IAIN Surakarta, 2007)

mengakibatkan sistem menjadi luruh, mengecil dan akhirnya berhenti. Oleh karena itu agar sistem terus berjalan maka sistem tersebut harus tetap memperoleh informasi yang cukup dan berguna.⁵

Perkembangan teknologi komputer sangat mempengaruhi perubahan cara kerja akuntansi dalam mengolah transaksi menjadi informasi, sistem informasi yang didasarkan pada komputer dikenal dengan istilah Sistem Informasi Akuntansi.

Fungsi yang terkait dalam Sistem Informasi Akuntansi sebagai berikut:

1. Fungsi Penjualan. Tanggung jawab fungsi ini yaitu menerima surat order pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang yang akan dikirim dan mengisi surat order pengiriman.
2. Fungsi Kredit. Fungsi kredit ini berada di bawah fungsi keuangan yang dalam transaksi penjualan kredit bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan.
3. Fungsi Gudang. Tanggung jawab dari fungsi ini yaitu menyimpan dan mempersiapkan barang yang dipesan pelanggan, dan menyerahkan barang ke fungsi pengiriman.
4. Fungsi Pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan.
5. Fungsi Penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirim faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi.

⁵ James A. Hall, *Accounting Information System* (Jakarta, Salemba Empat, 2007), h. 65-68.

6. Fungsi Akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit serta membuat laporan penjualan.⁶

Kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perusahaan memerlukan suatu sistem pengolahan data informasi yang mendukungnya. Kebutuhan ini akan terpenuhi dengan adanya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi harus dirancang dan digunakan secara efektif, karena informasi akuntansi merupakan bagian yang paling penting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen. Sistem informasi akuntansi dalam perusahaan dapat membantu pihak-pihak manajemen memperoleh informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan utama perusahaan termasuk dalam hal pemberian atau pembayaran kompensasi kepada karyawan yang berupa gaji dan upah. Biaya gaji dan upah yang jumlahnya cukup besar dapat meningkatkan risiko penggunaan gaji dan upah yang tidak semestinya.

Dinas perdagangan memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya dinas perdagangan melakukan banyak tugas yang diantaranya perumusan kebijakan bidang perdagangan, pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan

⁶ James A. Hall, *Accounting Information System* (Jakarta, Salemba Empat, 2001), h.59-62.

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang perdagangan. Sistem informasi akuntansi mulai diterapkan pada dinas perdagangan untuk melihat dan mengontrol sistem pengendalian internalnya yang memiliki unsur-unsur berupa lingkungan pengendalian , pengendalian resiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan atau monitoring.

Dari semua pengendalian internal yang ada salah satunya adalah terkait penggajian dan pemberian upah kepada karyawan. Pengendalian atas gaji dan upah harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan kecermatan agar transaksi tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang harus diderita oleh perusahaan. Dalam penelitian awal diketahui bahwa sistem penggajian dan pengupahan belum berjalan dengan efektif dan efisien karena terkadang waktu pembayaran gaji masih belum sesuai dengan prosedur waktu yang ada. Untuk itulah penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian penerapan sistem informasi akuntansi pada dinas perdagangan kota parepare : perspektif keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan pada Dinas Perdagangan Kota Parepare?
2. Apakah sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare telah dilakukan berdasarkan prinsip Akuntansi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada Dinas Perdagangan Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare telah dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam bidang Ekonomi Islam (Syariah).
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan (mirip) dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Yani Sundari dengan judul skripsi “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Kerta Gaya Pusaka Medan ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi penggajian dalam meningkatkan efisiensi biaya pada PT. Kerta Gaya Pusaka Medan .⁷ Persamaan kedua penelitian ini yaitu mengenai sistem informasi akuntansi penggajian dan keefektifitasan penerapannya. Adapun perbedaan penelitian ini adalah hasil dari penelitian Yani Sundari adalah dilihat dari unsur sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, PT. Kerta Gaya Pusaka Medan masih menunjukkan ketidaksesuaian dimana masih belum diterapkannya pencatatan dokumen secara terstruktur, dimana pemakaian nomor seri atau nomor faktur untuk tiap dokumen belum sepenuhnya diberikan. Selain itu dari unsur sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yaitu praktik yang sehat, PT. Kerta

⁷ Yani Sundari “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Kerta Gaja Pusaka Medan”. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)

Gaya Pusaka Medan belum sepenuhnya menciptakan pengecekan kerja secara terpisah, misalnya pada bagian Kasir (Kasa) yang bertugas melakukan pencatatan dan pembayaran gaji dan upah masih ditemukannya penetapan jumlah gaji dan upah dari karyawan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Sedang hasil penelitian penulis penelitian menunjukkan Dinas Perdagangan Kota Parepare menerapkan sistem akuntansi syariah dalam pengelolaan pemberian gaji kepada pegawai, dokumen dan data yang digunakan sudah terstruktur serta dalam penerapan sistem informasi penggajian pada Dinas Perdagangan sudah berjalan baik dan memadai juga tidak ada kesalahan dalam pemberian gaji kepada pegawai karena gaji yang diberikan sudah sesuai dengan golongan gaji dari setiap pegawai yang telah diatur dalam undang-undang. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Yani sundari dilakukan di PT.Kerta Gaya Pusaka Medan sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Dinas Perdagangan Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Nur Setiyowati dengan judul skripsi “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian (Studi Kasus Pada KSU Bhakti Mulya Kota Blitar”. Penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi pada KSU Bhakti Mulya Kota Blitar. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Nur Setiyowati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait sistem informasi akuntansi penggajian pada sebuah lembaga. Perbedaannya kedua penelitian

⁸ Wiwit Nur Setiyowati “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian (Studi Kasus Pada KSU Bhakti Mulya Kota Blitar” . (Skripsi:UIN PGRI Kediri,2016)

ini pada hasil dimana hasil penelitian yang didapatkan oleh Wiwit Nur Setiyowati diketahui dengan adanya pelaksanaan SOP dengan baik maka efektifitas pelaksanaan SOP dapat berjalan dengan baik. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian yang diterapkan di KSU Bhakti Mulya Kota Blitar sudah efektif. Dalam sistem penggajian KSU Bhakti Mulya cukup baik, tapi perhitungannya masih manual belum menggunakan sistem penggajian secara komputerisasi. Sedangkan hasil penelitian penulis penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem penggajian pada Dinas Perdagangan sudah efektif dan baik karena sudah pengelolaan penggajian dilakukan secara komputerisasi sehingga mengurangi terjadinya kesalahan pencatatan dalam pengimputan gaji bagi setiap pegawai. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Nur Setiyowati berlokasi di KSU Bhakti Mulya Kota Blitar sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Dinas Perdagangan Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Widiyanti dengan judul skripsi “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian PNS Berdasarkan PP No 30 Tahun 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian PNS mampu berperan dalam menilai berdasarkan standar PP No 30 Tahun 2015 pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif analisis deskriptif.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Widiyanti dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti terkait sistem informasi yang

⁹ Wiwid Widayanti, “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pns Berdasarkan Pp No 30 Tahun 2015”. (Skripsi:STIESIA Surabaya, 2017)

diterapkan pada sebuah lembaga adapun perbedaannya terletak pada hasil penelitian dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Widiyanti menunjukkan bahwa struktur organisasi instansi telah memenuhi standar peraturan Gubernur dimana tugas, wewenang dan tanggungjawab telah diatur akan tetapi belum diterapkan kode tingkatan pertanggungjawaban. Dalam informasi akuntansi penggajian PNS telah memenuhi standar PP No 30 tahun 2015 dan standar pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada APBD belanja gaji PNS telah sesuai dengan standar peraturan APBD. Sedangkan hasil penelitian penulis penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan gaji pada Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah sesuai peraturan perundang-undangan dimana gaji pegawai diberikan sesuai dengan besar golongan pegawai tersebut gaji pegawai pada Dinas Perdagangan Kota Parepare diberikan langsung oleh Bendahara Umum Daerah, dalam pengelolaannya Bendahara Dinas Perdagangan hanya menginput gaji dan rekapitulasi gaji seluruh pegawai kepada bendahara umum daerah (BUD). Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Widiyanti berlokasi di Sekretariat DPRD Jawa Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Dinas Perdagangan Kota Parepare.

B. Tinjauan Teoritis

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan merupakan kegiatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah implementasi teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan.

Menurut Usman (dalam naskah akademis RUU Sinas Iptek, 2018), penerapan bermuara pada aksi, atau tindakan atas suatu system. Makna penerapan merupakan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (dalam naskah akademis RUU Sinas Iptek 2018), penerapan adalah perluasan aktifitas yang memerlukan jaringan pelaksanaan dan birokrasi yang efektif untuk menserasikan tujuan dan tindakan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas disimpulkan bahwa penerapan bermuara pada aksi atau tindakan atas suatu sistem.¹⁰

Berdasarkan dari pendapat para ahli tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan merupakan suatu sistem atau metode yang terencana secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang diimplementasikan melalui tindakan dari suatu sistem.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹¹

¹⁰ Muhammad Dimiyati, *Metode Penelitian Untuk Semua Generasi* (Jakarta: UI Publishing, 2022), h.24-25.

¹¹ Wahab, *Tujuan Penerapan Program* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h.63.

2. Sistem Informasi Akuntansi

a. Pengertian

Berkembangnya kebutuhan informasi telah mendorong perkembangan akuntansi sebagai suatu sistem informasi, perkembangan ini mengakibatkan perubahan beberapa istilah dan teknik yang digunakan. Jika sebelumnya pemrosesan data akuntansi disebut dengan sistem akuntansi, maka sekarang relevan dengan sebutan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Dalam *Statement of Financial Accounting Concept No. 2, Financial Accounting Standards Board* mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. *Accounting education change commission* merekomendasikan bahwa kurikulum akuntansi harus menekankan bahwa akuntansi adalah suatu proses identifikasi, pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Dengan tiga konsep dasar yaitu:

- 1) Pemakaian informasi di dalam pengambilan keputusan,
- 2) Sifat, desain, pemakaian, dan implementasi sistem informasi akuntansi,
- 3) Pelaporan informasi keuangan.¹²

Sistem informasi akuntansi didefinisikan Lim sebagai suatu alat yang terintegrasi di lapangan dengan system informasi dan teknologi suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi menurut Steve A. Moscovice adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah,

¹² F. Baramuli., S.S. "Pangemanan.Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Yamaha Bima Motor Toli-Toli". Jurnal EMBA, Vol 3, No.3, Tahun 2015. h.25.

menganalisis, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditur) dan pihak-pihak dalam terutama manajemen.¹³

Sistem informasi akuntansi (SIA) selain digunakan sebagai alat manajemen untuk mendapatkan informasi, menganalisis dan memutuskan, juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggung jawabkan wewenang yang telah didelegasikan manajemen kepada *level-level* manajemen di bawahnya dan karyawan pelaksana. Pertanggung jawaban tersebut akan berjalan lancar dengan bantuan suatu system yang memungkinkan setiap karyawan mencatat dan mendokumentasikan seluruh kejadian dan transaksi yang terjadi dengan sistematis, teratur, baku dan mudah.¹⁴

SIA terdiri atas tiga sub sistem:

- 1) Sistem pemrosesan transaksi adalah sub sistem yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan.
- 2) Sistem buku besar/pelaporan keuangan adalah sub sistem yang menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak serta berbagai laporan lainnya yang disyaratkan oleh hukum.
- 3) Sistem pelaporan manajemen adalah sub bab yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta

¹³Faiz Zamzami, dkk, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), h.3.

¹⁴Anna Marina, dkk, *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal* (Surabaya:UMSurabaya Publishing, 2017), h.32.

informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja serta laporan pertanggungjawaban.¹⁵

b. Elemen Sistem Informasi Akuntansi

- 1) Sistem informasi akuntansi pokok meliputi:
 - a) Bukti transaksi (dokumen, formulir)
 - b) Catatan-catatan akuntansi, yang terdiri dari:
 - (1) Jurnal
 - (2) Buku besar
 - (3) Buku pembantu
 - c) Laporan-laporan yang dihasilkan baik laporan keuangan maupun laporan-laporan yang lain.
- 2) Sistem operasional dan prosedur
 - a) Sistem dan prosedur penjualan
 - b) Sistem dan prosedur pengelolaan piutang dagang
 - c) Sistem dan prosedur penerimaan kas
 - d) Sistem dan prosedur pembelian
 - e) Sistem dan prosedur penanganan hutang dagang
 - f) Sistem dan prosedur pengeluaran kas
 - g) Sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan
 - h) Sistem dan prosedur pengelolaan persediaan
 - i) Sistem dan prosedur akuntansi biaya produksi

¹⁵Taufan Adi Kurniawan, *Sistem Informasi Akuntansi Dengan Pendekatan Simulasi* (Jakarta:CV Budi Utama,2020), h. 5.

j) Sistem dan prosedur pengelolaan aktiva tetap

Selain dua elemen pokok diatas, sistem informasi akuntansi juga mempunyai pengendali sistem untuk mengkoordinasikan elemen-elemen tersebut sehingga tujuan sistem dapat tercapai. Dan yang jelas, sistem informasi akuntansi juga mempunyai pemakai, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi pemakai internal dan eksternal. Umumnya mereka lebih banyak berkepentingan terhadap hasil akhir yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi yaitu laporan keuangan.¹⁶

c. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

- 1) Mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, SIA juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat.
- 2) Mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan SIA.
- 3) Membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi.
- 4) Mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan.

¹⁶Atyanto Mahatmyo, *Sistem Infomrasi Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014), h. 9-10.

- 5) Sebagai suatu sistem pengendali keuangan, agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail.¹⁷

d. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

- 1) Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan beberapa fungsi.
- 2) Prosedur-prosedur, baik manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
- 3) Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
- 4) *Software* yang dipakai untuk memproses data organisasi.
- 5) Infrastruktur teknologi informasi, seperti computer, peralatan untuk komunikasi jaringan, dan peralatan pendukung lainnya.¹⁸

e. Dasar Proses dan Transaksi Bisnis dalam SIA

Transaksi bisnis terbagi dalam beberapa tipe proses atau siklus bisnis, yaitu:

- 1) Kontrol pendapatan

Segala transaksi bisnis yang terjadi dalam proses ini terdiri dari penjualan harian, retur penjualan, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan masuknya arus kas.

¹⁷Ansye Paulus, "Fungsi Sistem Informasi Akuntansi atas Pengendalian Internal Pendapatan". Jurnal EMBA Vol 4 No. 4 Tahun 2016. h. 922.

¹⁸ Faiz Zamzami, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016) h.21.

2) Kontrol pengeluaran

Segala transaksi bisnis yang terjadi dalam proses ini terdiri dari pembelian, retur pembelian, biaya-biaya, dan transaksi lainnya terkait dengan keluarnya arus kas. Pembayaran gaji dan pembelian asset tetap juga masuk dalam kategori ini.

3) Kontrol konversi

Terdiri dari biaya-biaya yang terkait transaksi pembelian bahan baku, dan bahan dalam proses.

4) Kontrol administratif

Terdiri dari segala transaksi yang berkaitan dengan ekuitas: investasi, obligasi dan sejenisnya. Dari kesemua proses bisnis tersebut akan bermuara di sistem, proses, dan kontrol buku besar (*General Ledger*). dari buku besar akan menghasilkan laporan keuangan internal dan eksternal.¹⁹

f. SIA dapat menambah nilai untuk organisasi

SIA yang didesain dengan baik, dapat menambah nilai untuk organisasi dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya, SIA dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Ini membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan mengurangi biaya.

¹⁹Faiz Zamzami, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016) h. 23.

- 2) Meningkatkan efisiensi. Contohnya, informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur *just-in-time* menjadi memungkinkan, karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka.
- 3) Berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya, kantor akuntan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagi praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antarkantor. Karyawan dapat mencari *database* perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan untuk klien tertentu; dengan demikian, keahlian internasional kantor akuntan publik dapat tersedia untuk klien lokal.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contohnya, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entri pesanan penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan.
- 5) Meningkatkan struktur pengendalian internal. SIA dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana.
- 6) Meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting dan ini akan dibahas secara lebih detail pada bagian setelah ini.²⁰

Pembuatan keputusan adalah aktivitas kompleks dan multistep: mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan dan menginterpretasikan

²⁰Marshal B. Roney dan Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketigabelas* (Jakarta: Salemba Empat, 2019) h. 11.

informasi, mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memilih metodologi solusi, dan mengimplementasikan solusi. SIA dapat memberikan bantuan dalam semua tahap pengambilan keputusan. Laporan dapat membantu untuk mengidentifikasi permasalahan potensial. Model keputusan dan alat analitis dapat diberikan kepada pengguna. Bahasa *query* dapat mengumpulkan data yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Berbagai alat, seperti *interface* grafis, dapat membantu pembuat keputusan dalam menginterpretasikan hasil model keputusan, mengevaluasinya, dan memilih di antara program alternatif tindakan. Selain itu, SIA dapat memberikan umpan balik pada hasil tindakan.

SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam beberapa cara:

- 1) Dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Contohnya, laporan biaya dengan varian (penyimpangan) yang besar mungkin menstimulasi manajemen untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan secara korektif, jika dibutuhkan.
- 2) Dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan.
- 3) Dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya, yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Contohnya, jika perusahaan mencoba strategi pemasaran tertentu dan informasi yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa itu tidak berhasil, perusahaan dapat menggunakan informasi untuk memilih strategi pemasaran yang lain.

- 4) Dapat memberikan informasi akurat yang tepat waktu. Contohnya, Walmart memiliki *database* yang sangat besar yang berisi informasi mendetail mengenai transaksi penjualan pada setiap tokonya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan jumlah setiap produk yang disimpan pada setiap toko.
- 5) Dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersamasama, dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagangan atau untuk mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait. Contohnya, Amazon menggunakan *database* penjualannya untuk menyarankan buku tambahan yang akan dibeli pelanggan.²¹

3. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Menurut Mulyadi sistem akuntansi penggajian dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayarannya. Mulyadi sistem informasi akuntansi penggajian digunakan untuk melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan gaji bagi karyawan yang dibayar tetap bulanan.²²

Mulyadi memberikan definisi gaji adalah sebagai berikut: gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, umumnya gaji diberikan secara tetap perbulan.

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya sistem informasi akuntansi penggajian adalah sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menangani

²¹Marshal B. Roney dan Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketigabelas* (Jakarta: Salemba Empat, 2019) h. 13-15.

²² Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016) h.340.

atau melaporkan transaksi – transaksi dan memberikan informasi terkait dengan penggajian karyawan.²³

Fungsi-fungsi umum yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan sangat diperlukan ketepatan dalam pemilihan fungsi yang nantinya akan digunakan tersebut, jangan sampai ada fungsi yang telah dipilih namun dalam penggunaan fungsi tersebut kurang efektif dan efisien, sehingga fungsi tersebut nantinya akan mengganggu dalam sebuah penerapannya. Namun, fungsi tersebut bisa digantikan dengan fungsi yang lainnya.

Menurut Mulyadi fungsi yang biasanya di gunakan dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu :

1) Fungsi Kepegawaian : Fungsi ini bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan posisi karyawan, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan.

2) Fungsi Pencatat Waktu : Fungsi ini bertanggungjawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atau bisa disebut dengan fungsi ganda.

3) Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah : Fungsi ini bertanggungjawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka

²³ Yenni Vera Fibriyanti, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan”. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. Vol II No. 1, Tahun 2017 , h. 373-374.

waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang nantinya dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan.

4) Fungsi Akuntansi Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan : fungsi atau bagian akuntansi ini bertanggungjawab penuh untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan (misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, dan ataupun utang dana pensiun).

5) Fungsi Keuangan Fungsi ini bertanggungjawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Utang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Dokumen Yang Digunakan Dalam Sistem Penggajian Dan Pengupahan Dokumen dalam sistem penggajian dan pengupahan sebaiknya lengkap dan transparan, agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan.²⁴

dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan adalah:

1) Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.

2) Kartu Jam Hadir Dokumen digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir ini dapat

²⁴ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016) h.317.

berupa daftar hadir biasa atau berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu.

3) Kartu Jam Kerja Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk.

4) Daftar Gaji dan Daftar Upah Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya.

5) Rekap Daftar Gaji dan Rekap Daftar Upah Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pada pesanan, rekap gaji dan upah dibuat untuk membebaskan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan rekap daftar gaji dan upah.

6) Surat Pernyataan Gaji dan Upah Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan.

7) Amplop Gaji dan Upah Uang gaji dan upah karyawan diserahkan setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman depan amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor

identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam periode tertentu.

8) Bukti Kas Keluar Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi/departemen keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Keseluruhan dokumen-dokumen tersebut harus disiapkan agar proses sistem informasi penggajian dan pengupahan dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa adanya kesalahan ataupun kekurangan sedikitpun.²⁵

Catatan Akuntansi Yang Digunakan Dalam Sistem Penggajian dan Pengupahan Catatan-catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan harus dibuat dengan baik dan tersimpan dengan aman, karena catatan-catatan tersebut merupakan bukti yang nyata atas setiap transaksi yang berhubungan dengan penggajian dan pengupahan dalam perusahaan tersebut, dan juga dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian atau kecurangan-kecurangan yang bisa saja terjadi.

Mulyadi dalam bukunya menyatakan bahwa catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan meliputi:

- 1) Jurnal Umum : Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja dalam tiap departemen di perusahaan.
- 2) Kartu Harga Pokok Produk : Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu.
- 3) Kartu Biaya : Catatan ini dipergunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam

²⁵ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016) h.320.

perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial.

4) Kartu Penghasilan Karyawan : Catatan mengenai penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21. Kartu penghasilan karyawan digunakan juga untuk tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatangani kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan.²⁶

Indikator-indikator dalam pemberian besaran gaji bagi karyawan di muat dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017. Terdapat lima indikator dalam pasal tersebut dalam penentuan gaji karyawan, lima indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Golongan Jabatan

Pengelompokan besaran penggajian berdasarkan golongan jabatan ini perusahaan atau instansi menentukan berdasarkan kelompok jabatan dalam hierarki perusahaan. Jabatan-jabatan yang tugas serta tanggungjawabnya relatif sama dapat digabung menjadi satu kelompok golongan jabatan. Golongan jabatan seorang pekerja akan menentukan di besar-kecilnya gaji dan fasilitas yang ia terima dari perusahaan.

b. Jabatan

Besaran gaji yang ditentukan menurut jabatan merupakan pengelompokan gaji berdasarkan bentuk dan tingkat pekerjaan. Setiap tingkat jabatan atau pekerjaan memiliki resiko pekerjaan, tingkat kesulitan dan

²⁶ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016) h.382.

pastinya tanggung jawab yang berbeda. Maka, jabatan pun menentukan besar-kecilnya gaji yang didapatkan karyawan.

c. Pendidikan

Pengetahuan menjadi hal yang penting dalam sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang dituntut harus memiliki *softskill* haruslah memiliki pengetahuan yang juga mumpuni. Maka dari itu penggolongan gaji karyawan menurut pendidikan juga menjadi satu hal yang sangat diperhatikan oleh perusahaan.

Selalu ada prasyarat minimal pendidikan untuk memegang jabatan tertentu. Pendidikan memang menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam angka gaji seorang karyawan, terutama pada awal karyawan masuk.

d. Kompetensi

Kemampuan pekerjaan seorang karyawan bisa dilihat dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Prasyarat tersebut yang biasanya dicari oleh suatu perusahaan untuk bidang pekerjaan tertentu.

e. Masa Kerja

Lamanya masa kerja karyawan pada suatu perusahaan juga menjadi salah satu penentu besaran gaji yang diberikan perusahaan. Karyawan yang memiliki lama kerja cukup lama dianggap sebagai karyawan yang loyal akan pekerjaannya. Jenis karyawan seperti ini yang biasanya memiliki tingkat keberhasilan dan proses pelaksanaan bisnis yang tinggi.

Pengalaman yang cukup lama yang dimiliki oleh karyawan dalam bidang tertentu akan memiliki nilai lebih dalam suatu pekerjaan. Tak heran

masa kerja turut berkontribusi pada besar-kecil gaji yang ditawarkan perusahaan untuknya.

4. Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Ini tidak hanya berlaku untuk sistem, tetapi juga untuk lembaga keuangan dan produk yang mereka tawarkan.

Akuntansi syariah dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akuntansi yang memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai islami yang digali menggunakan epistemologi islam. Adapun tujuan akuntansi syariah adalah memberikan informasi secara lengkap untuk mengetahui nilai dan kegiatan ekonomi yang bertentangan, serta yang diperbolehkan secara syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Dalam konsep syariah teori yang baik dan sehat didapatkan melalui Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, berupa segala macam hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam sebagai penerima wahyu, akuntansi syariah merupakan jawaban dari masalah ekonomi saat ini dan bukan hanya ditujukan kepada ummat muslim saja, karena karakteristik Al-Qur'an adalah Rahmatan lil alamin.²⁷

Sebagaimana diriwayatkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 282 yaitu

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ

²⁷ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi*, h.3.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُوبُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْفُوبَهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan.²⁸

Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik.

Kuangan Islam adalah sistem yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga dari penafsiran sumber-sumber wahyu oleh para ilmuwan. Struktur

²⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2015), h.44.

keuangan Islam telah berubah selama 30 tahun terakhir. Dimulai sebagai salah satu implementasi modern terpenting dari sistem hukum Islam sebagai ujian bagi pembaharuan dan pengembangan syariat Islam masa depan.²⁹

Menurut Muhammad, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.³⁰

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Kebudayaan kita, umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan an diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S.Al-Muddassir/74:38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya :

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.³¹

²⁹ Muh Arafah, “Sistem Keuangan Islam:Sebuah Telaah Teoritis” Journal of Islamic Economic and Business, 2019,h. 1.

³⁰ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 11.

³¹ Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), h.576.

b. Prinsip keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara interen melekat dalam fitrah manusia. Dalam monteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. dalam Al-Qur'an d'sampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita mnguranginya.

Berdasarkan prinsip keadilan diatas, dalam Q.S.An-Nahl/16:90 disebutkan

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³²

³² Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), h.274 .

c. Prinsip kebenaran

Kamus umum Bahasa Indonesia (oleh Purwadarminta), ditemukan arti kebenaran, yaitu:

- 1) Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya)
- 2) Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya)
- 3) Kejujuran, ketulusan hati
- 4) Selalu izin, perkenan
- 5) Jalan kebetulan

Penjelasan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu. Akuntansi merupakan system informasi keuangan usaha yang mencatat tentang penentuan laba, pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban (*accountability*). Akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sedangkan dalam Islam ada tata nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan.³³

Dijelaskan dalam Al-Quran Q.S.Al-Anfal/8:27

³³ Lantip Susilowati, *Tanggung Jawab, Keadilan, Dan Kebenaran Akuntansi Syariah*. Jurnal An-Nisbah Vol.03,No.02, April 2017, h. 303-305

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.³⁴

Adanya hal tersebut maka kriteria tanggungjawab, keadilan dan kebenaran, harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi dalam pengembangan akuntansi syariah.

C. Tinjauan Konseptual

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan merupakan kegiatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah implementasi teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan.

2. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut Steve. A. Moscovice adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditur dan pihak-pihak dalam terutama manajemen.³⁵

3. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Menurut Mulyadi sistem akuntansi penggajian dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayarannya. Mulyadi sistem

³⁴ Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), h.180 .

³⁵ Faiz Zamzami, dkk, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), h.3-4.

informasi akuntansi penggajian digunakan untuk melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan gaji bagi karyawan yang dibayar tetap bulanan.

4. Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Keuangan Islam adalah sistem yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga dari penafsiran sumber-sumber wahyu oleh para ilmuwan.

Berdasarkan peneritan tinjauan konseptual diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi dari adanya sistem informasi akuntansi dapat mempermudah pengelolaan sistem penggajian dengan tetap menerapkan sistem akuntansi syariah.

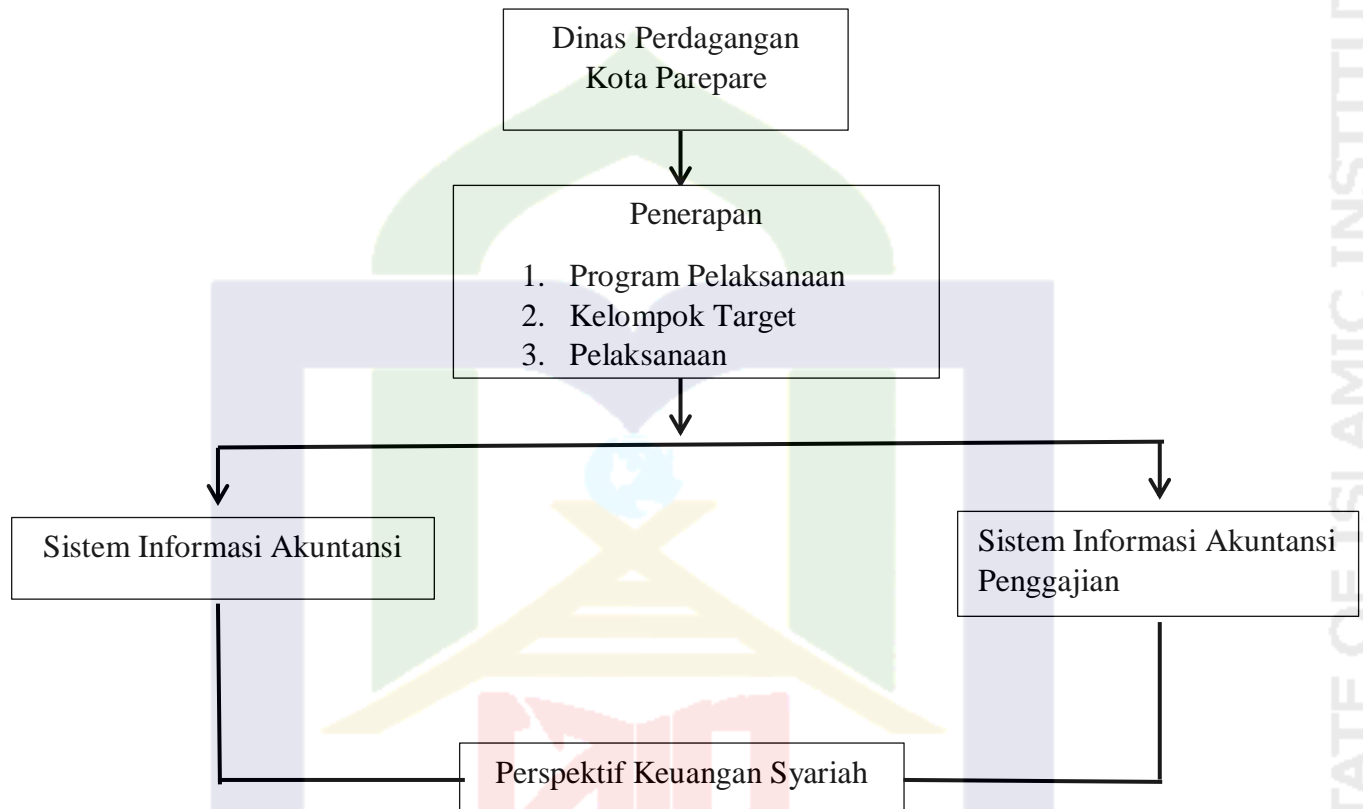
D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.³⁶

Bagan kerangka pikir dibawah ini menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare. Dengan penggunaan sistem informasi akuntansi pada proses penggajian, membantu pihak yang bertanggung jawab dalam menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas dan relevan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu keadilan, tanggung jawab dan

³⁶ Firdaus & Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2018), h. 76.

kebenaran agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku khususnya bagi entitas syariah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



Tabel 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor yang dikutip oleh Meleog, menyatakan bahwa metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁷ Penelitian kualitatif mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau deskriptif. Sesuai dengan objek yang akan diteliti, penulis menggunakan metode observasi dan kajian Pustaka di dalam mengumpulkan data penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi sesuai dengan topik penelitian. Kajian kepustakaan dilakukan untuk menuliskan dan mengklarifikasi berbagai macam data yang diperoleh, seperti dari buku, skripsi, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya.³⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana

³⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

³⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan informan dan bukan pandangan peneliti sendiri.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Kota Parepare. Waktu penelitian yang digunakan yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada penerapan sistem informasi akuntansi penggajian yang pada Dinas Perdagangan Kota Parepare berdasarkan perspektif keuangan syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realita yang relevan dengan penelitian, dimana relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Data primer diperoleh dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian.⁴⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari semua informasi melalui teknik wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian tentang sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif keuangan syariah)

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 348.

⁴⁰ Wahyudin Darmalaksana, “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*” (Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati: Bandung, 2020).h.4.

Data sekunder adalah informasi, fakta dan realitas yang relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung didapatkan di lokasi penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen, foto-foto, dan sumber lainnya yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.⁴¹ Sedangkan pengolahan data merupakan Langkah peneliti untuk menjaring data yang sebenarnya.⁴²

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴³ yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan.

⁴¹ Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 33.

⁴² IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.23.

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 118.

2. Wawancara

Gorden mendefinisikan wawancara “*Interviewing is conversation between two people in which one person tries to direct the conversation to obtain information for some specific purpose*”.⁴⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara ialah pembicaraan yang dilakukan dua orang, dengan salah satu dari orang tersebut menggali informasi secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang diperbincangkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang berasal dari Bahasa latin yaitu *docere*, yang artinya mengajar. Dalam Bahasa inggris disebut document yaitu “*something written or printed, to be used as a record or evidence*”, sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan dan bukti. Nasution menyebutkan bahwa: “ada pula sumber non manusia, (*non human resources*), diantaranya, dokumen, foto dan bahan statistic.”⁴⁵

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari jawaban yang tidak jujur dari informan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

⁴⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 31.

⁴⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 146.

memanfaatkan sesuatu yang lain.⁴⁶ Maka, dalam pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi:

1. Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan mengecek ulang dan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan.
2. Triangulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan data hasil data dengan alat pengumpulan data yang digunakan.
3. Triangulasi dengan teori, dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang dikemukakan para pakar dengan hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Sebagaimana Langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman ada tiga, yaitu.⁴⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan pengelolaan data dengan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan tidak terlepas dari aktivitas analisis data dari konseptual dan teoritis. Dalam prosesnya, reduksi data berfungsi untuk mempertajam, memilih, memilah, memfokuskan, memotong atau membuang data-data yang ada.

⁴⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 6.

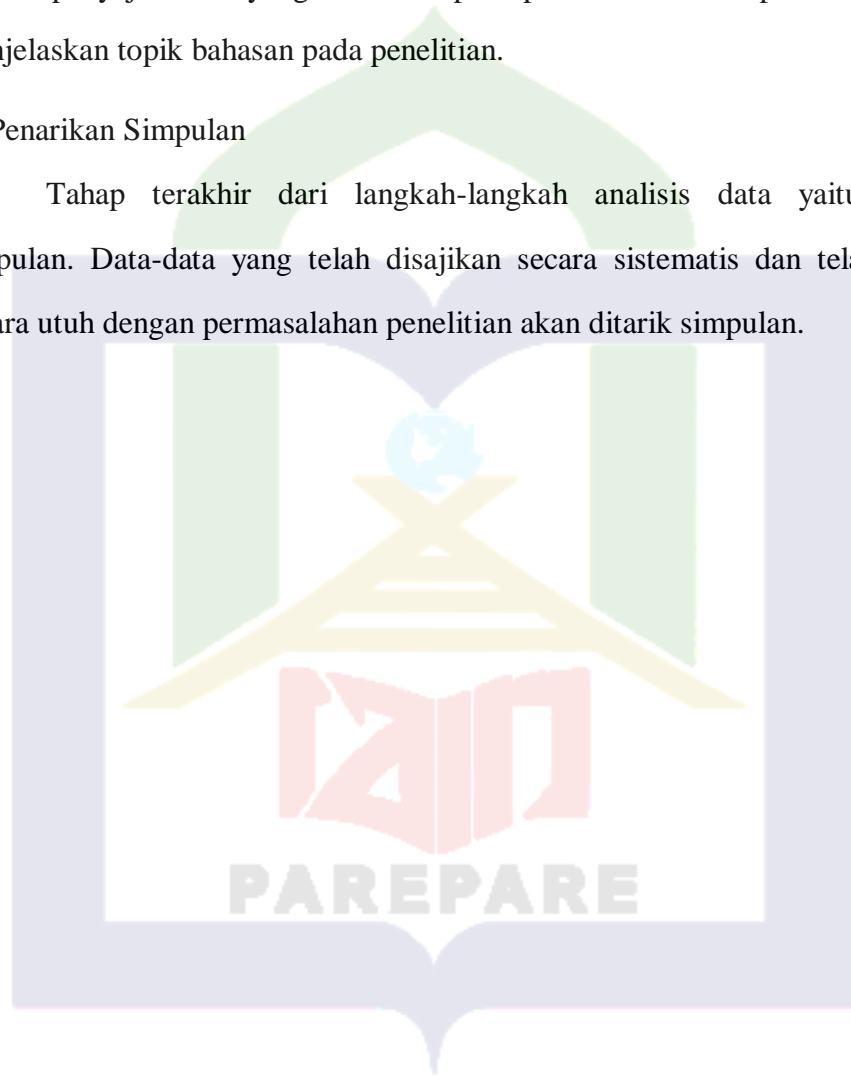
⁴⁷ Wahyudin Darmalaksana, “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*”. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati: Bandung, 2020.h.6.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mengekukan data-data yang telah terkumpul, selanjutnya akan dirumuskan untuk menghasilkan suatu simpulan. Bentuk penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini berupa teks naratif yang menjelaskan topik bahasan pada penelitian.

3. Penarikan Simpulan

Tahap terakhir dari langkah-langkah analisis data yaitu penarikan simpulan. Data-data yang telah disajikan secara sistematis dan telah dikaitkan secara utuh dengan permasalahan penelitian akan ditarik simpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare

Hasil penelitian tentang penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare berdasarkan perspektif keuangan syariah, peneliti mendapatkan beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Program pelaksanaan penggajian

Pengertian gaji dan upah pada Dinas Perdagangan Kota Parepare adalah pembayaran yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas hasil kerja yang telah dilakukannya bagi perusahaan.

Dengan diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka RKA sebagai dokumen yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.

Sebagai salah satu persiapan dalam penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019, suluh pegawai yang bertanggungjawab atas pengoperasian aplikasi SIPD diikutkan pelatihan input perencanaan RKPD Tahun Anggaran 2022 melalui Aplikasi SIPD kepada masing-masing operator SIPD pada masing-masing seksi dan sub bagian di Dinas Perdagangan Kota Parepare.

“ya ada pelatihan yang kami ikuti sebelum menggunakan aplikasi SIPD ini, kan aplikasi ini merupakan aturan baru yang diberikan oleh kemendagri dan baru digunakan tahun ini juga”⁴⁸

Proses pelatihan dilaksanakan dengan memberikan bimbingan teknis berupa penjelasan tahap-tahap penginputan data melalui Aplikasi SIPD yang sekaligus diimplementasikan langsung oleh para operator SIPD Dinas Perdagangan Kota Parepare.

“pelatihannya kami ikuti di Makassar yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Manajemen dan Akuntansi Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin (LKPKMAKD UNHAS) selama lima hari”⁴⁹

Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan agar setiap operator SIPD dapat menyusun perencanaan kegiatan Tahun 2022 melalui aplikasi SIPD sesuai dengan pagu indikatif yang sudah diberikan. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat memudahkan operator SIPD dalam pengisian/penginputan rencana kegiatan pada tahap penyusunan RKA, serta dapat meminimalisir berbagai kekeliruan yang akan terjadi pada saat penginputan data tersebut.

⁴⁸ Nur Zamzam, Bendahara Pengeluaran, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 15 November 2022

⁴⁹ Nur Zamzam, Bendahara Pengeluaran, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 15 November 2022

Tabel 4.1 Tabel Anggaran Gaji Pegawai Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Parepare

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Parepare Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPA/B.1/3.3.31.0.00.18.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Program	: 3.30 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
Kegiatan	: 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 3.30.3.31.0.00.18.0000 DINAS PERDAGANGAN			
Unit	: 3.30.3.31.0.00.18.0000 DINAS PERDAGANGAN			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp3.555.550.354 (<i>terbilang tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak ukur kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.196.555.651	Dana yang dibutuhkan	Rp3555.550.354
Keluaran	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan SKPD	4 Layanan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan SKPD	3 Layanan
Hasil	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan SKPD	85 Persen	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan SKPD	100 persen
Klp. Sasaran Kegiatan	ASN Dinas Perdagangan			
Sub Kegiatan	3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendapatan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	Kota Parepare			

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Tabel diatas merupakan rincian anggaran gaji pegawai pada Dinas Perdagangan Kota Parepare tahun 2022. Program penggajian yang diberikan kepada pegawai dilakukan dengan menyusun anggaran besaran gaji yang akan

diberikan kepada pegawai, berdasarkan data yang peneliti terima untuk anggaran tahun 2022 terkait gaji pegawai dianggarkan sebesar Rp3.555.550.344 yang sudah termasuk gaji pokok dan tunjangan akan diberikan kepada seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare dengan jumlah pegawai 42 orang.

2. Kelompok target

Pelaksanaan program penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare ditargetkan untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah tercatat sebagai pegawai dari Dinas Perdagangan Kota Parepare.

“kalau berbicara mengenai target atau sasaran ya tentu saja seluruh pegawai disini, itu yang menjadi sasaran atau target dari pemberian gaji yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan hak nya yang harus diterima masing-masing atas jeri payah yang sudah di lakukan”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa target dari program pemberian upah dan gaji adalah para pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare yang berjumlah 42orang.

3. Pelaksanaan

Sistem penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare melibatkan Bagian Keuangan. Bagian Keuangan bertanggung jawab dalam melakukan proses perhitungan gaji pegawai. Koordinasi Akuntansi dan Keuangan bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran gaji pegawai, dan bertanggung jawab dalam membuat pembukuan dari transaksi pembayaran gaji. Dalam pengelolaan sistem penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare dikelola oleh satu orang pegawai yang disebut sebagai bendahara penggajian, tugas dari bendahara ini adalah untuk melakukan atau mengelola sistem akuntansi penggajian.

⁵⁰ Sabir Zainuddin, Kasubag Administrasi dan Umum ,wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 03 November 2022

“pihak yang terkait dalam pelaksanaan penggajian disini itu ada bagian keuangan itu melibatkan bendahara pengeluaran dan bendahra penggajian itu sendiri, kemudian ya tidak hanya bagian keuangan saja tapi juga melibatkan sub bagian administrasi dan kepegawaian serta kepala dinas itu sendiri”⁵¹

Dalam sistem akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare ada beberapa unsur yang mendukung terjadinya penggajian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber ibu zamzam mengatakan bahwa ada beberapa unsur yang terkait dengan penggajian di Dinas Perdagangan Kota Parepare.

“ terkait fungsi dalam sistem penggajian itu ada namanya kepala sub bagian administrasi umum dan kepegawaian. Nah disini data pegawai yang di mutasi , pindah, pension, naik jabatan dll kemudian ada kepala sub bagian program dan keuangan, masalah penggajian berdasarkan jabatan, golongan dan masa kerja. Tentu kedua sub bagian ini saling terhubung karena data pegawai yang akan dibayar harus kami terima dulu dari bagian kepegawaian lalu bagian keuangan membayar sesuai data yang diterima dari kepegawaian, nah ada juga yang namanya pembuat daftar gaji atau disini itu disebut pendahara penggajian nanti dia yang bertanggungjawab membuat daftar gaji pegawai, kemudian desetujui oleh kepala dinas”⁵²

Unsur-unsur dalam sistem akuntansi penggajian adalah:

1. Fungsi yang terkait

a. Fungsi kepala sub bagian administrasi dan umum dan kepegawaian

Fungsi sub bagian administrasi dan umum dan kepegawaian yang bertanggungjawab untuk mengelola semua data kepegawaian termasuk data pegawai yang pindah, pensiun, naik jabatan dan segala yang terkait dengan pegawai.⁵³

⁵¹ Sabir Zainuddin, Kasubag Administrasi dan Umum ,wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 03 November 2022.

⁵² Nur Zamzam, Bendahara Pengeluaran, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 15 November 2022

⁵³ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat,2016) h.317.

b. Fungsi pembuat daftar gaji

Bagian ini ditangani oleh Ibu Husna Amir selaku bendahara penggajian dan bertanggungjawab untuk membuat daftar gaji yang berisi gaji pokok, serta tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai serta potongan-potongan yang menjadi beban pegawai setiap bulannya. Daftar gaji tersebut dikelola oleh bagian pembuat daftar gaji dalam hal ini bendahara penggajian guna pembuatan daftar gaji yang diajukan ke bendahara umum daerah (BUD), untuk pembayaran gaji pegawai.

c. Fungsi sub bagian program dan keuangan

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan gaji pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan masa kerja. Data pegawai yang akan dibayar diterima melalui sub bagian administrasi dan kepegawaian lalu bagian keuangan memberikan besaran gaji sesuai data yang diterima dari kepegawaian.

d. Kepala dinas

Kepala Dinas bertugas menerima dan menandatangani daftar gaji seluruh pegawai yang telah disusun oleh bagian keuangan.

2. Dokumen yang digunakan

Ibu Zamzam selaku bendahara pengeluaran mengatakan bahwa

“dokumen pendukung tentunya juga dibutuhkan terutama dari bagian kepegawaian seperti daftar perubahan gaji pegawai, daftar gaji, rekap daftar gaji dan daftar hadir pegawai karena jika pegawai tidak masuk kantor tanpa keterangan pasti akan diberikan sanksi seperti gajinya ditunda untuk diberikan”⁵⁴

⁵⁴ Nur Zamzam, Bendahara Pengeluaran, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 15 November 2022

Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare, sebagai berikut:

a. Dokumen pendukung perubahan gaji

Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi administrasi dan kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan pegawai. Dokumen ini berupa surat keputusan pengangkatan pegawai baru, pemberhentian sementara, pindah, pensiun, dan mutasi.⁵⁵

b. Daftar hadir

Daftar hadir adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai. Sistem untuk pencatatan waktu hadir pegawai di Dinas Perdagangan Kota Parepare menggunakan mesin pencatatan hadir (*Fingerprint*), sehingga alat ini merekam jam masuk dan keluar pegawai.

Pegawai yang tidak masuk kantor tanpa keterangan memiliki aturan berupa sanksi seperti penundaan pembayaran gaji.

c. Daftar gaji

Dokumen ini berisi jumlah gaji setiap pegawai yang ditambah tunjangan-tunjangan dan dikurangi potongan-potongan, iuran dan lain-lain.

d. Rekap daftar gaji

Rekap daftar gaji merupakan ringkasan gaji yang dibuat oleh pembuat daftar gaji setiap bulan.

⁵⁵ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016) h.320.

3. Catatan akuntansi yang digunakan

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare adalah, sebagai berikut:

a. Buku kas umum

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan pembayaran gaji pegawai pada Dinas Perdagangan Kota Parepare.

b. Kartu penghasilan pegawai

Kartu ini merupakan catatan mengenai penghasilan pegawai dan berbagai potongan yang diterima oleh pegawai.⁵⁶

Penjelasan ketiga elemen penggajian diatas pada Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah sesuai dengan teori yang telah penulis jelaskan dalam tinjauan teoritis tentang sistem informasi akuntansi penggajian yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” dimana semua elemen tersebut juga telah dipenuhi pada proses pengelolaan penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare.

Pengelolaan penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare dilakukan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer hal ini dikarenakan adanya aturan dari pemerintah daerah ataupun kementerian dalam negeri tentang sistem informasi pemerintahan daerah yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

“ya pengelolaan disini sudah berbasis komputer semua, kita ini perusahaan dibawah naungan daerah jadi dalam menjalankan tugas itu kita hanya mngeikuti aturan dari pemerintah daerah saja”⁵⁷

⁵⁶ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat,2016) h.382.

Sistem penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare didasarkan pada gaji bulanan, yaitu dimana pegawai menerima gaji tetap setiap bulannya yaitu setiap tanggal 01 atau awal bulan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bendahara bagian penggajian sebagai berikut.

“Pembayaran gaji pegawai disini itu diterima setiap tanggal satu”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara keterlambatan dalam penggajian biasanya terjadi ketika tahun baru atau pada bulan Januari, gaji pegawai yang biasanya diterima setiap tanggal 01 pada bulan Januari akan diterima paling lambat tanggal 04 dikarenakan prosesnya yang merupakan anggaran baru, keterlambatan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena dalam proses penggajian ini Dinas Perdagangan Kota Parepare menerima pembayaran dari pemerintah daerah dikarenakan Dinas Perdagangan merupakan salah satu bentuk lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah daerah.

“Ya keterlambatan gaji itu biasanya terjadi dibulan Januari atau tahun baru gaji pegawai itu akan diterima paling lambat tanggal 04 karena kan kita ini menerima gaji dari dana transfer dari pemerintah daerah nanti pemerintah daerah terima dari pemerintah pusat, jadi keterlambatannya hanya terjadi disitu dikarenakan prosesnya menggunakan anggaran baru”⁵⁹

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Zamzam diatas selaras dengan yang disampaikan oleh salah satu pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare Ibu Nirmala M selaku Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

⁵⁷ Sabir Zainuddin, Kasubag Administrasi dan Umum ,wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 03 November 2022.

⁵⁸ Nur Zamzam, Bendahara Pengeluaran, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 15 November 2022

⁵⁹ Nur Zamzam, Bendahara Pengeluaran, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 15 November 2022

“tidak ada masalah dalam penggajian hanya saja terkadang terjadi keterlambatan gaji yang kami terima itu biasanya di awal tahun, gaji yang seharusnya kami terima di tanggal satu pada awal tahun biasanya akan diterima pada tanggal empat atau lima”⁶⁰

Menurut sistem penggajiannya pada Dinas Perdagangan kota Parepare mengikut pada peraturan perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi

⁶⁰ Nirmala M, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 07 Februari 2023

yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus.⁶¹

Selain gaji pokok, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :

- a. Tunjangan keluarga,
- b. Tunjangan jabatan,
- c. Tunjangan pangan, dan
- d. Tunjangan lain-lain.

“Pengelolaan gaji disini itu diberikan berdasarkan golongannya jadi sudah ada kepastian pendapatan disitu berdasarkan golongan dari masing-masing pegawai dan itu sudah diatur dalam undang-undang”⁶²

Jabatan seorang PNS dibedakan menjadi empat golongan dan dalam setiap golongan ada pangkatnya masing-masing. Hal itu dikelompokkan berdasarkan masa kerja yang sudah ditempuh atau prestasi yang diperoleh, antara lain:

1. Golongan 1

Golongan 1 dibagi menjadi empat pangkat yaitu 1A, 1B, 1C, dan 1D. Pada umumnya, PNS yang menempati golongan 1 merupakan dari orang-orang lulusan SD maupun SMP.

⁶¹ Kementerian Keuangan, “Gaji PNS-Biro Sumber Daya Manusia”, diakses dari <https://www.google.com/search?q=sistem+penggajian+pegawai&oq=sistem+penggajian+pegawai&aqs=chrome.69i59j0i512i4j0i22i3015.6239j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 09.33 WITA.

⁶² Sabir, Kasubag Administrasi dan Umum, wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 03 November 2022.

2. Golongan 2

Golongan 2 dibagi menjadi empat pangkat yaitu 2A, 2B, 2C, dan 2D. Pada umumnya, PNS yang menempati golongan 2 merupakan dari orang-orang lulusan SMA maupun D3.

3. Golongan 3

Golongan 3 dibagi menjadi empat pangkat yaitu 3A, 3B, 3C, dan 3D. Pada umumnya, PNS yang menempati golongan 3 merupakan dari orang-orang lulusan D4 hingga S3

4. Golongan 4

Golongan 4 dibagi menjadi lima pangkat yaitu 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Pada umumnya, PNS yang menempati golongan 4 berkaitan dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Berdasarkan Undang-undang diatas dapat diketahui bahwa terdapat empat macam gaji yang diberikan kepada pegawai diluar dari gaji pokok, yang diberikan berdasarkan golongan dari setiap pegawai yang akan dirincikan seperti dibawah ini.

1. Gaji PNS Golongan 1

- a. Golongan 1A atau yang disebut juga dengan Juru Muda dengan masa kerja dibawah satu tahun hingga dua puluh enam tahun, mendapatkan gaji pokok senilai Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800.
- b. Golongan 1B atau yang disebut juga dengan Juru Muda Tingkat I dengan masa kerja sekitar tiga tahun hingga dua puluh tujuh tahun, mendapatkan gaji pokok senilai Rp1.704.500 hingga Rp2.474.900.

- c. Golongan 1C atau yang disebut juga dengan Juru dengan masa kerja sekitar tiga tahun hingga dua puluh tujuh tahun, memperoleh gaji pokok sebesar Rp1.776.600 hingga Rp2.557.500.
 - d. Golongan 1D atau yang disebut juga dengan Juru Tingkat I dengan masa kerja sekitar tiga tahun hingga dua puluh tujuh tahun, memperoleh gaji pokok sebesar Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500.
2. Gaji PNS Golongan 2
- a. Golongan 2A atau yang disebut juga dengan Pengatur Muda dengan masa kerja dibawah satu tahun hingga tiga puluh tiga tahun, memperoleh gaji pokok sejumlah Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600.
 - b. Golongan 2B atau yang disebut juga dengan Pengatur Muda Tingkat I dengan masa kerja sekitar tiga tahun hingga tiga puluh tiga tahun, memperoleh gaji pokok sejumlah Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300.
 - c. Golongan 2C atau yang disebut juga dengan Pengatur dengan masa kerja sekitar tiga tahun hingga tiga puluh tiga tahun, memperoleh gaji pokok sejumlah Rp2.301.800 sampai Rp3.665.000.
 - d. Golongan 2D atau yang disebut juga dengan Pengatur Tingkat I dengan masa kerja sekitar tiga tahun hingga tiga puluh tiga tahun, memperoleh gaji pokok sejumlah Rp2.399.200 sampai Rp3.820.000.
3. Gaji PNS Golongan 3
- a. Gaji PNS Golongan 3a : Rp2.579.400 – Rp4.236.400
 - b. Gaji PNS Golongan 3b : Rp2.688.500 – Rp4.415.600
 - c. Gaji PNS Golongan 3c : Rp2.802.300 – Rp4.602.400
 - d. Gaji PNS Golongan 3d : Rp2.920.800 – Rp4.797.000

4. Gaji PNS Golongan 4

- a. Gaji PNS Golongan 4a : Rp3.044.300 – Rp5.000.000
- b. Gaji PNS Golongan 4b : Rp3.173.100 – Rp5.211.500
- c. Gaji PNS Golongan 4c : Rp3.307.300 – Rp5.431.900
- d. Gaji PNS Golongan 4d : Rp3.447.200 – Rp5.661.700
- e. Gaji PNS Golongan 4e : Rp3.593.100 – Rp5.901.200

Penggolongan gaji pegawai pada Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah sesuai dengan yang telah penulis jelaskan pada tinjauan teoritis tentang indikator penggajian, dimana pada Dinas Perdagangan gaji pegawai diberikan berdasarkan golongan dan jabatan dari masing-masing pegawai tersebut.

Dinas Perdagangan Kota Parepare memiliki 42 orang pegawai dengan masing-masing golongan, berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis sebagai berikut.

Tabel 4.2 Golongan Gaji Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare

Gol	Pegawai	Istri	Anak	Jml. Jiwa
IV	4	2	2	8
III	34	22	40	96
II	4	3	6	13
I	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	42	27	48	117

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Pada tabel diatas menunjukkan tabel data golongan gaji pegawai di Dinas Perdagangan Kota Parepare, terdapat empat golongan yang pertama golongan 1

dalam tabel dapat dilihat tidak ada pegawai yang termasuk dalam golongan 1, selanjutnya pada golongan 2 terdapat 4 pegawai, golongan 3 terdiri dari 34 pegawai dan golongan 4 terdapat 4 pegawai dengan jumlah pegawai 42 pegawai. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Khaerana Supardi selaku pegawai di Dinas Perdagangan Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

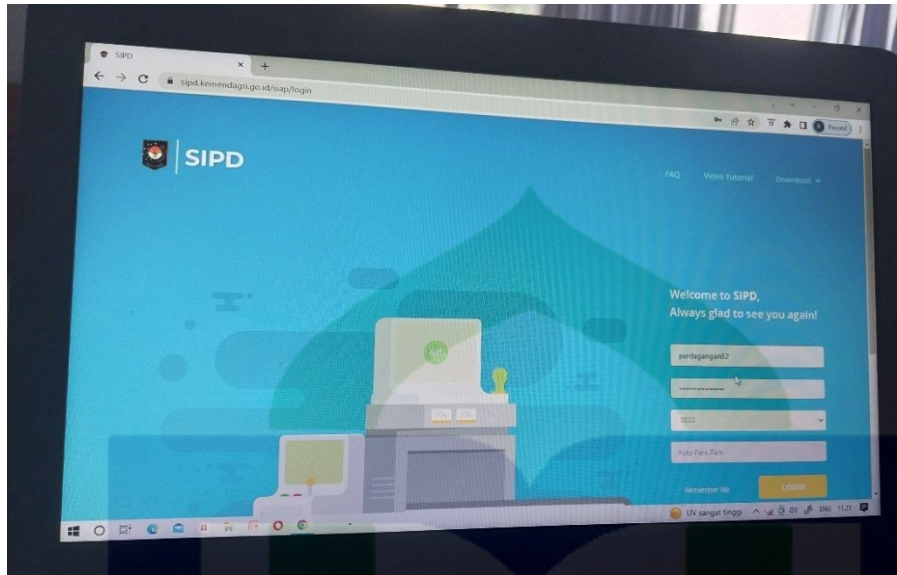
“ya memang benar sistem gaji di sini itu diberikan berdasarkan golongannya karena kita ini merupakan lembaga pemerintahan jadi dalam sistem penggajian pun sudah diatur oleh pemerintah”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem gaji di Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah sesuai dengan kementerian keuangan dan gaji pegawai diberika sesuai dengan golongan gaji dari masing-masing pegawai.

Dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare menggunakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yaitu SIPD , Sesuai dengan amanat undang-undang 23/2014 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sementara untuk difinisi SIPD sendiri adalah Sistem Informasi yang membantu penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah secara Elektronik yang pelaksanakannya oleh pemerintah daerah secara nasional.

⁶³ Khaerana Amir, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 07 Februari 2023

Gambar 4.1 Tampilan aplikasi SIPD



Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Parepare

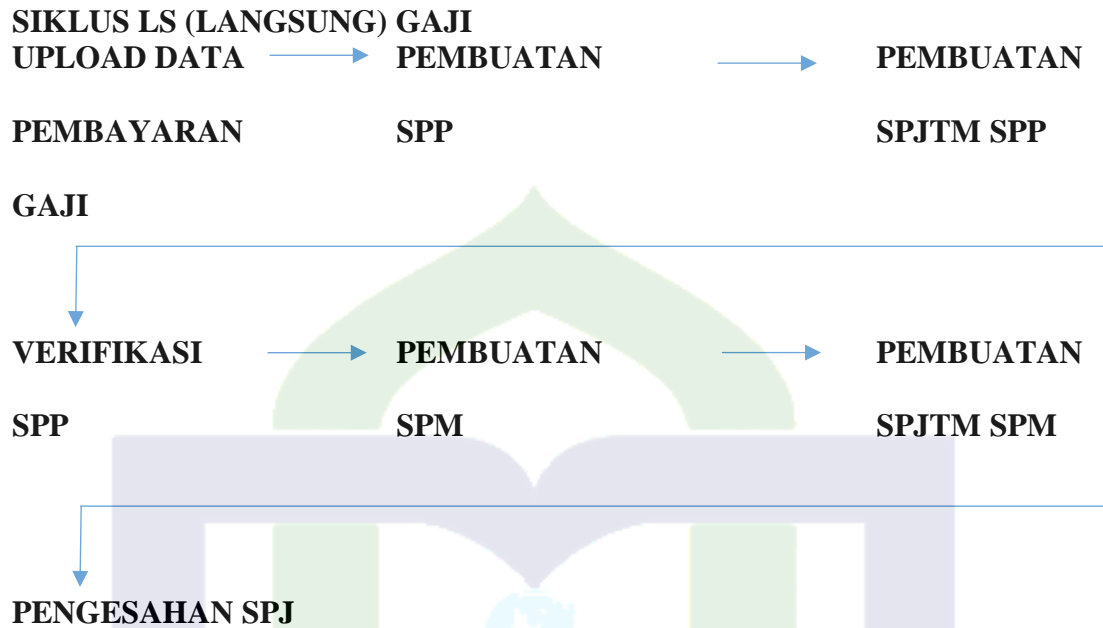
Aplikasi SIPD adalah aplikasi yang digunakan oleh bendahara penggajian untuk mengelola data gaji pegawai, seluruh sistematika penggajian diolah melalui aplikasi tersebut, sesuai dengan yang dikatakan oleh Husna S.E, yang mengatakan bahwa

“ jadi ya selama sistem penggajian itu diolah hanya menggunakan satu aplikasi saja yaitu aplikasi SIPD ini, semua sudah ada didalam mulai perencanaan maupun penganggarannya”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare dilakukan dengan menggunakan komputerisasi dimana sistem penggajian ini hanya dioperasikan oleh satu orang saja yang diberi tanggungjawab untuk mengelola gaji para pegawai di Dinas Perdagangan Kota Parepare.

⁶⁴ Husna Amir, Bendahara Penggajian, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 03 November 2022

Gambar 4.2 Siklus Gaji Dinas Perdagangan Kota Parepare



Sumber data: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Berdasarkan siklus penggajian diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan sistem penggajian ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber atau dalam hal ini adalah Husna S.E selaku bendahara penggajian dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Langkah pertama yang dilakukan oleh bendahara penggajian adalah mengupload data gaji pegawai melalui aplikasi SIPD dengan cara masuk ke aplikasi SIPD menggunakan akun bendahara penggajian.

Tabel 4.3 Daftar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH KOTA PAREPARE	
DAFTAR GAJI DSB. UNTUK PARA PEGAWAI DINAS PERDAGANGAN BULAN: OKTOBER 2022	
GAJI INDUK	
PENGHASILAN:	
01. GAJI POKOK	Rp 142.060.560
02. TUNJANGAN ISTRI	Rp 9.065.164
03. TUNJANGAN ANAK	Rp 3.207.097
04. TUNJANGAN PERB. PENGHASILAN	Rp -
05. TUNJANGAN STRUTURAL	Rp 11.035.000
06. TUNJANGAN FUNGSIONAL	Rp 1.790.000
07. TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	Rp 4.790.000
08. JAMINAN KESEHATAN 4%	Rp -
09. TUNJANGAN BERAS	Rp 8.473.140
10. TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH	Rp -
11. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL	Rp -
12. TUNJANGAN Pph PASAL 21	Rp 192.968
13. TUNJANGAN JKK	Rp -
14. TUNJANGAN JKM	Rp -
15. TUNJANGAN TAPER A PK	Rp -
16. PEMBULATAN	Rp 2.244
JUMLAH KOTOR	Rp 180.746.173
POTONGAN	
01. IURAN WAJIB (IWP 1%)	Rp 1.720.778
02. IURAN WAJIB (IWP 8%)	Rp 12.346.627
03 Pph PASAL 21	Rp 192.968
04. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp -
05. POTONGAN BULOG	Rp -
06. POTONGAN AKSES	Rp -
07. POTONGAN LAIN-LAIN	Rp -
08. POTONGAN SEWA RUMAH	Rp -

09. POTONGAN JKK	Rp	-
10. POTONGAN JKM	Rp	-
11. POTONGAN TAPER A PK	Rp	-
12. POTONGAN TAPER A PEGAWAI	Rp	-
JUMLAH POTONGAN	Rp	14.260.373
JUMLAH BERSIH	Rp	166.485.800
<i>Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu delapan Ratus Rupiah</i>		

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Tabel diatas merupakan table rekapitulasi gaji pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare untuk periode bulan Oktober 2022, berdasarkan tabel diatas Dinas Perdagangan Kota Parepare memiliki gaji pokok untuk pegawai sebesar Rp142.060.560 besaran gaji pokok ini merupakan rkapitulasi dari jumlah pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare yang berjumlah 42 orang pegawai. Pada tabel diatas terdapat rincian gaji dengan potongan dan tunjangan-tunjangan nya mulai dari tunjangan istri, anak , struktural dan lain-lain dengan total keseluruhan potongan sebesar Rp14.260.373 menghasilkan jumlah bersih gaji sebesar Rp166.485.800.

2. Selanjutnya bendahara penggajian membuat surat perminta pembayaran (SPP)

Gambar 4.3 Surat Permintaan Pembayaran

KOTA PAREPARE
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 Nomor: 19.20.02.0/0000033/LS/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/9/2022
 Tahun Anggaran: 2022

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Nomor	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD-19.20/01.0/000002/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/3/2022			
01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
01.2.02.01 penyediaan gaji dan tunjangan perangkat daerah			
1	5.1.01.01.01.0001	Belaja gaji pokok PNS	Rp 142.060.5
2	5.1.01.01.02.0001	Belanja tunjangan keluarga PNS	Rp 12.272.261
3	5.1.01.01.03.0001	Belanja tunjangan jabatan PNS	Rp 11.035.000
4	5.1.01.01.04.0001	Belanja tunjangan fungsional PNS	Rp 1.920.000
5	5.1.01.01.05.0001	Belanja tunjangan fungsional umum PNS	Rp 4.790.000
6	5.1.01.01.06.0001	Belanja tunjangan beras PNS	Rp 8.473.140
7	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembuatan gaji PNS	Rp 2.244
NOMOR SPD-19.20/01.0/000002/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/3/2022			
01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
01.2.02.01 penyediaan gaji dan tunjangan perangkat daerah			
8	5.1.01.01.07.0001	belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS	Rp 192.968
TOTAL : Rp			180.746.173
Terbilang: seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah.			

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Tabel diatas menunjukkan bahwa setelah melakukan upload daftar gaji langkah selanjutnya yaitu membuat surat permintaan pembayaran dengan rincian anggaran sebesar Rp180.746.173

- Langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan SPJTM SPP atau surat pernyataan tanggungjawab mutlak perintah pembayaran, dalam pembuatan SPJTM ini bendahara penggajian akan menggunakan akun pengguna anggaran.

4. Langkah selanjutnya yang dilakukan mengverivikasi SPP, dalam tahap ini bendahara penggajian akan menggunakan akun PPK atau pejabat penata usaha keuangan.
5. Langkah kelima yang dilakukan yaitu pembuatan SPM atau surat perintah membayar yang ditujukan kepada bendahara umum daerah (BUD)

Gambar 4. 4 Surat Perintah Membayar

TAHUN ANGGARAN 2022		No. SPM: 19.20/01.0/000334/S/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/9/2022	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE Subaya menerbtkan SP2D kepada:			
SKPD : DINAS PRDAGANGAN		Pestangan-petangan: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)	
No. : terlampir		No.	Uraian (s.d. rekening)
Rekening Bank : terlampir		1	Surat Wajib Pegawai 8%
NUPP : terlampir		2	Surat Wajib Pegawai 3%
Dasar : 19.20/01.0/000033/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/9/2022		3	PPN 2%
Pembayaran		4	Surat Jaminan Kesehatan 4%
		5	Surat Jaminan Kecelakaan Kerja
		6	Surat Jaminan Kematian
		7	Tagora
		8	Zakat
		9	Bubog
		Jumlah	Rp14.260.373
Untuk Keperluan PEMBAYARAN GAJI BULAN OKTOBER 2022			
Pembayaran pada kode kegiatan			
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	
SPD - 19.20/01.0/000062/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/9/2022		Rp180.746.173	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp180.553.205	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp180.553.205	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp142.050.560	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp12.272.261	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp11.025.000	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp1.920.000	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp4.790.000	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp8.473.140	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp2.244	
SPD - 19.20/01.0/000033/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/9/2022		Rp192.968	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp192.968	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp192.968	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp192.968	
	Jumlah	Rp180.746.173	
Jumlah SPP yang Diminta:		Rp180.746.173	
<i>(terbilang: seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah)</i>			
Nomor dan Tanggal SPP		Pare Pare, 26 September 2022	
19.20/02.0/000334/S/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/9/2022 tanggal 2022-09-26		Prasetyo Catur Nugroho, S.H., M.Si NIP. 197310131980022003	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PAUKPA			

Sumber Data: Dinas Prdagangan Kota Parepare

Gambar diatas menunjukkan gambar SPM atau surat permintaan membayar gaji kepada bendahara umum daerah (BUD). Dalam surat SPM tersebut berisi rincian mengenai gaji pegawai beserta potongan dan tunjangan tunjangan lainnya.

6. Membuat SPJTM SPM atau surat pernyataan tanggungjawab mutlak perintah membayar.
7. Memverivikasi kelengkapan dan keabsahan SPP

Gambar 4.5 Verifikasi SPP

**PEMERINTAH KOTA PARE PARE
DINAS PERDAGANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : HJ. IRMA SURYANI, S.Pd.MM
NIP : 196606111991022003
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 19.20/02.0/000033/LS/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/9/2022 tanggal 26 September 2022 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pare Pare, 26 September 2022
PPK SKPD

DINAS PERDAGANGAN TELAH DIPERIKSA DAN DISAHKAN OLEH	
KETUA PPK 6 SEP 2022	PPK SKPD
HJ. IRMA SURYANI, S.Pd, MM NIP. 19660611 199102 2 003	SYAMSIAH, SE. NIP. 19551207 200502 2 001

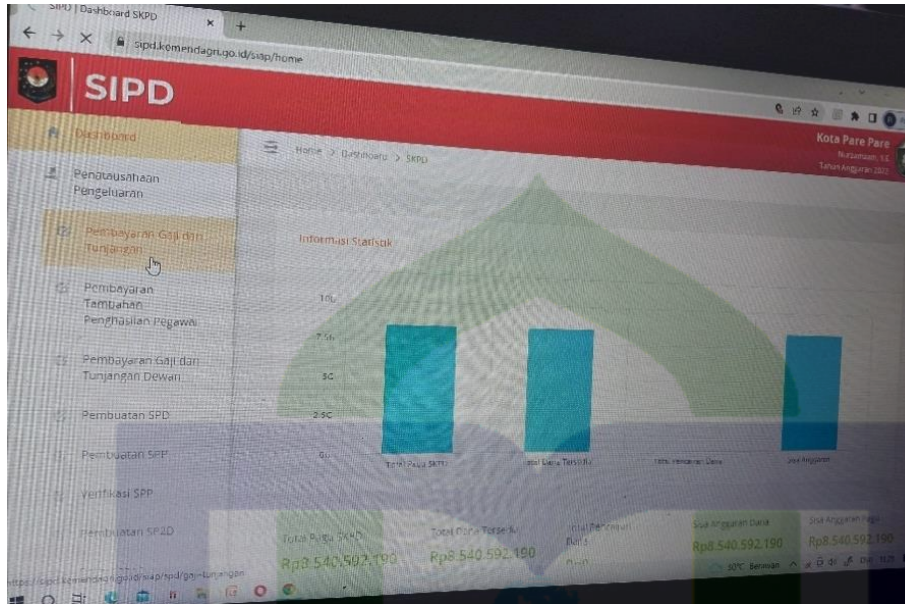
HJ. IRMA SURYANI, S.Pd.MM
NIP. 196606111991022003

Sumber Data: Dinas Prdagangan Kota Parepare

Gambar diatas menunjukkan surat pengesahan dan verifikasi kelengkapan data penggajian.

Setelah dokumen penggajian serta surat perintah pembayaran sudah diajukan maka untuk tahapan selanjutnya sudah menjadi kuasa BUD sampai pada tahapan penerimaan gaji yang otomatis akan langsung masuk kerekening masing-masing pegawai.

Gambar 4.6 Tampilan Awal SIPD



Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Dalam pelaksanaannya ibu Zamzam selaku bendahara pengeluaran mengatakan bahwa

“Pelaksanaan penggunaan sistem sudah baik dikarenakan SDM ASN yang sudah mumpuni”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah berjalan dengan baik dikafrenakan SDM ASN yang sudah mumpuni dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

B. Penerapan Akuntansi Syariah Pada Sistem Penggajian di Dinas Perdagangan Kota Parepare

Akuntansi Syariah haruslah dipahami sebagai sebuah alat yang memiliki orientasi sosial. Sebab akuntansi Islam tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga

⁶⁵ Nur Zamzam, Bendahara Pengeluaran, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 15 November 2022

sebagai suatu metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Hal ini tidak sama dengan perbedaan antara akuntansi deskriptif dengan akuntansi normatif. Akuntansi deskriptif ini bertujuan untuk menawarkan akuntansi yang cocok dengan tujuan tertentu. Jika tujuan berbeda, maka pasti norma juga berbeda. Secara jelas akuntansi Islam yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah adalah upaya penerapan akuntansi yang menyangkut masalah ekonomi, masalah politik, dan juga masalah akuntansi itu sendiri. Dengan kata lain, fungsinya sebagai bagian dari syariah. Dalam konteks itu harus diterima, bahwa akuntansi syariah memainkan peranan untuk menyesuaikan kelompok yang berkepentingan bisnis dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh pak Sabir

“Sistem akuntansi syariah tidak ada yang digunakan dalam perusahaan pemerintahan tapi ya tetap ada unsur akuntansi syariah didalamnya seperti tanggungjawa, kebenaran dan keadilan”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya Dinas Perdagangan Kota Parepare menggunakan sistem akuntansi pemerintahan akan tetapi ketiga prinsip akuntansi syariah juga diterapkan di Dinas Perdagangan Kota Parepare.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Khaerana Supardi terkait penerapan akuntansi syariah di Dinas Perdagangan Kota Parepare, apakah menerapkan prinsip syariah berikut jawaban ibu Khaerana Supardi:

“kalau mengenai prinsip syariah sebagaimana yang diketahui dinas perdagangan ini merupakan lembaga pemerintahan jadi dalam pengelolaannya tidak menggunakan sistem akuntansi syariah, namun jika

⁶⁶ Sabir, Kasubag Administrasi dan Umum ,wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 03 November 2022.

dilihat dari unsur akuntansi syariah seperti pertanggungjawaban, kebenaran, dan keadilan ya tentu hal itu diterapkan di sini”⁶⁷

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah menerapkan sistem akuntansi syariah walaupun dalam implementasi tidak menggunakan sistem akuntansi syariah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Hastura terkait penerapan akuntansi syariah pada Dinas Perdagangan Kota Parepare, Ibu Hastura mengatakan:

“kami sebagai lembaga pemerintahan itu tidak menggunakan sistem akuntansi syariah tapi tentu ketiga untuk prinsip akuntansi syariah itu diterapkan disini”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas diambil kesimpulan bahwa Dinas Perdagangan tetap menerapkan ketiga prinsip akuntansi syariah walaupun dalam sistem pengelolaan menggunakan sistem akuntansi pemerintahan.

Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare diperoleh jawaban yang hampir serupa jawaban yang satu dengan yang lainnya dari masing-masing pegawai.

Penerapan sistem akuntansi syariah tidak sepenuhnya diterapkan pada Dinas Perdagangan Kota Parepare karena diketahui bahwa Dinas Perdagangan merupakan lembaga pemerintahan jadi dalam pengelolaan keuangannya menggunakan sistem akuntansi pemerintahan.

⁶⁷ Khaerana Supardi, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 07 Februari 2023

⁶⁸ Hastura, Staff Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 07 Februari 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga untuk prinsip akuntansi syariah diterapkan pada Dinas Perdagangan meskipun dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan Kota Parepare tidak menggunakan sistem akuntansi Syariah.

1. Prinsip Pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban diartikan sebagai sebuah keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam artian keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan.

Pertanggung jawaban ini berkaitan atau berimplikasi secara langsung dengan konsep amanah dimana dalam bisnis dan akuntansi individu yang terlibat langsung harus selalu melakukan pertanggung jawaban atas apa yang diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dalam bentuk lapiran keuangan ataupun laporan pertanggung jawaban. Laporan keuangan yang ada dan laporan pertanggung jawaban selalu dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan Kota Parepare dalam melakukan penggajian kepada pegawai.

Dalam melakukan pemisahan tugas yang ada di Dinas Perdagangan Kota Parepare masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sabir selaku Kasubag Administrasi dan Umum:

“Setiap pegawai itu memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dimana dalam menjalankan tugasnya itu tentu dilandasi dengan rasa tanggungjawab”⁶⁹

⁶⁹Sabir, Kasubag Administrasi dan Umum ,wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 03 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Parepare melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip tanggungjawab.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Husnah Amir selaku Bendahara Penggajian Dinas Perdagangan Kota Parepare terkait prinsip pertanggungjawaban, apakah diterapkan di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Ibu Husnah Mengatakan bahwa:

“ya tentu saja dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan prinsip tanggungjawab, semua tugas yang diberikan dikerjakan sebagaimana mestinya, terkait gaji juga saya sebagai bendahara gaji mengelola gaji pegawai dengan tanggungjawab, semua sistem penggajian saya kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada”⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam kegiatannya, dalam hal ini pada penerapan sistem penggajian bendahara penggajian melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nirmala selaku pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare terkait penerapan prinsip tanggungjawab, apakah diterapkan di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Ibu Nirmala mengatakan bahwa:

“prinsip pertanggungjawaban tentunya hal ini yang mendasari sitiap pekerjaan yang diberikan, amanah yang diberikan harus dijalankan dengan rasa tanggungjawab”⁷¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua pegawai dalam menjalankan tugas dan amanahnya disertai dengan rasa tanggungjawab.

⁷⁰ Husnah Amir, Bendahara Penggajian ,wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 03 November 2022.

⁷¹ Nirmala M, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 07 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama beberapa narasumber didapatkan jawaban yang serupa, dimana dalam setiap pengelolaan dan pekerjaan yang dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah menerapkan prinsip pertanggungjawaban. Dalam hal penggajian dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang dibuat sebagai berikut.

Gambar 4.7 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
DINAS PERDAGANGAN

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS
Nomor: 19.20/02.0/000033/SPTJM-SPP/LS/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/9/2022

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 19.20/02.0/000033/LS/3.30.3.31.0.00.18.0000/M/9/2022 tanggal 26 September 2022 yang kami ajukan sebesar Rp180.746.173 (terbilang seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) Untuk keperluan DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2022, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Mangetahui,
Pengguna Anggaran

DINAS PERDAGANGAN TELAH DIPERIKSA DAN DISAHKAN OLEH	
KETUA PPK	26 SEP 2022
Hj. IRMA SURYANI, S.Pd, MM NIP. 19860511 199102 2 003	SYAMSIAH, SE. NIP. 19851207 200502 2 001

PRASETYO CATUR KRISNANTO, S.H., M.Si
NIP. 197310132000043003

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Gambar diatas menunjukkan bahwa dalam pembuatan daftar gaji pegawai yang diajukan kepada bendahara umum daerah adalah benar adanya dan akan digunakan sebagaimana mestinya. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak tersebut yang dibuat oleh bendahara penggajian sudah ditanda tangani oleh kepala

dinas Dinas Perdagangan Kota Parepare dan dinyatakan keasliannya untuk kemudian diberikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)

Prinsip tentang tanggungjawab ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S.Al-Muddassir/74:38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya :

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.⁷²

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu perbuatan dalam hal ini merupakan penggunaan anggaran penggajian yang dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Parepare harus selalu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan laporan ralisasi dan laporan kinerja yang ada.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan apabila seseorang memperoleh apa yang haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama.⁷³ Dinas Perdagangan Kota Parepare menerapkan prinsip keadilan dalam memberikan besaran gaji bagi setiap pegawainya yang disesuaikan dengan kinerja dan golongan pendapatan gaji yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji bagi pegawai negeri sipil.

⁷²Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), h. 576.

⁷³Lantip Susiolowati, *Tanggung jawab, keadilan dan kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No. 02, 2017, h. 303-305

“gaji yang diberikan kepada semua pegawai tentunya diberikan secara adil sesuai dengan undang-undang berdasarkan golongan pegawai tersebut”⁷⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sovie selaku pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare terkait prinsip keadilan, apakah prinsip keadilan sudah diterapkan di Dinas Perdagangan Kota Parepare. Ibu Sovie mengatakan bahwa:

“setiap gaji yang diberikan tentunya sudah secara adil ya , sudah sesuai dengan yang harus diterima oleh setiap pegawai karena juga disini itu sistem penggajian diberikan sesuai dengan golongan masing-masing”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Parepare menerapkan prinsip keadilan, dimana dalam hal gaji sudah diberikan sesuai dengan golongan masing-masing pegawai.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pemberian gaji kepada pegawai itu sudah diberikan berdasarkan prinsip keadilan dimana gaji yang diberikan kepada pegawai sudah berdasarkan golongan yang diterima oleh pegawai tersebut.

⁷⁴Husna Amir, Bendahara Penggajian, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 03 November 2022

⁷⁵ Sovie De Buck, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 07 Februari 2023.

Gambar 4.8 Rekapitulasi gaji pergolongan

REKAPITULASI GAJI PNS/CPNS PER GOLONGAN
Oktober 2022
DINAS PERDAGANGAN

JENIS GAJI	GAJI INDIK	JUNJAI PEGAJAWAI	GAJI POKOK TUNJ. ISTRI TUNJ. ANAK TPP	PENGHASILAN				POTONGAN				JUMLAH BERSIH	KETERANGAN
				TUNJ. STRUKTURAL TUNJ. UJIAN TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL TKD TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. BPJSKES 4% TUNJ. JKK TUNJ. JKM TAPERA PK PEMBULATAN JMLKOTOR	POT. PAJAK POT. BPJSKES POT. IWP 1% POT. IWP 8% POT. HUTANG	POT. BILOG POT. SEWA RUMAH POT. JKK POT. JKM TAPERA PK TAPERA PEGAWAI	JUMLAH POTONGAN				
GOLONGAN IV		4 2 6	17,483,400 866,000 166,364 0	5,245,000 0 0 0	0 0 579,360 174,638	0 0 0 0	0 0 1,481,181 0	174,638 0 237,598 0	0 0 0 0	22,820,800			
GOLONGAN III		34 22 40 96	113,246,000 7,347,204 2,699,548 0	5,790,000 4,070,000 1,920,000 0	0 0 6,952,320 10,330	0 0 0 0	0 0 10,330 0	18,330 0 1,350,727 9,853,628	0 0 0 0	130,812,800			
GOLONGAN II		4 3 6 13	11,331,100 852,860 341,184 0	720,000 0 0 0	0 0 941,460 0	0 0 0 0	0 0 1,002,020 0	132,453 1,002,020 0 0	0 0 0 0	13,052,400			
GOLONGAN I		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0			
TOTAL PERSATKER		42 27 48 117	142,060,560 9,065,164 3,207,097 0	11,035,000 4,790,000 1,920,000 0	0 8,473,140 192,868 0	0 0 0 0	0 2,244 180,746,173 0	182,968 1,720,778 12,346,627 0	0 0 0 0	166,485,800			

Hal: 14.250/371
PAREPARE, 19 SEPTEMBER 2022
PEMBAUT DAFTAR GNS

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PRASETYO SATIYANINGRAT, SH
NIP. : 197310132003030003

BENDAHARA PENGELUARAN
MURZAMZAM, SE
NIP. : 198003202014092005

HUSMAH ANIR, SE
NIP. : 197608062010012013

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Parepare

Gambar diatas menunjukkan bahwa gaji pegawai pada Dinas Perdagangan Kota Parepare diberikan sesuai dengan golongan atau kelompok gaji yang sudah sesuai dan diberikan secara adil sesuai dengan gaji yang berhak diterima oleh setiap pegawai. Tabel data diatas sesuai dengan dikatakan narasumber sebagai pegawai dari Dinas Perdagangan yang digaji mengatakan bahwa:

“ya benar gaji yang saya terima sudah sesuai dengan yang ada di tabel gaji pegawai”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian gaji

⁷⁶ Khaerana Supardi, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 07 Februari 2023

kepada pegawai, gaji yang diterima pegawai sudah sesuai dengan golongan dari masing-masing pegawai.

Ibu Nirmala M selaku pegawai di Dinas Perdagangan Kota Parepare juga mengatakan bahwa:

“ya gaji yang saya terima sudah sesuai dengan yang semestinya”⁷⁷

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Parepare memang sudah menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian gaji kepada seluruh pegawainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas terkait penerapan prinsip keadilan di Dinas Perdagangan Kota Parepare dalam hal ini yaitu pemberian gaji pegawai sudah diterapkan secara adil, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari beberapa pegawai yang mengatakan bahwa prinsip keadilan sudah diterapkan di Dinas Perdagangan Kota Parepare. Dalam sistem penggajiannya Dinas Perdagangan Kota Parepare ,memberikan gaji kepada pegawai sesuai dengan golongan masing-masing pegawai.

Berdasarkan prinsip keadilan diatas, dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl /16:90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan

⁷⁷ Nirmala M, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 07 Februari 2023

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷⁸

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah penjelasan, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini kemudian mengiringinya dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an bagi mereka. Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah menyatakan, “Sesungguhnya Allah selalu menyuruh semua hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan Dia juga memerintahkan mereka berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil; memberi bantuan apa pun yang mampu diberikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus dan ikhlas, kepada kerabat, yakni keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan siapa pun. Dan selain itu, Dia melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama, seperti berzina dan membunuh; melakukan kemungkaran yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam adat kebiasaan dan agama; dan melakukan permusuhan dengan sesama yang diakibatkan penzaliman dan penganiayaan. Melalui perintah dan larangan ini Dia memberi pengajaran dan tuntunan kepadamu tentang hal-hal yang terkait dengan kebajikan dan kemungkaran agar kamu dapat mengambil pelajaran yang berharga.

Jadi gaji yang diperoleh oleh semua pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah adil dan diberikan sesuai aturan yang ada.

⁷⁸ Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), h.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dengan apa yang dilaporkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, beban, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntans dalam praktek wajib mengukur semuanya dengan tanggung jawab, benar, dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi tersebut.⁷⁹ Dalam implementasinya prinsip kebenaran tidaklah lepas dari prinsip keadilan dan pertanggung jawaban dimana untuk mengukur kebenaran maka perlu mengukur pertanggung jawaban dan keadilan.

Dinas Perdagangan Kota Parepare atau dalam hal ini adalah bendahara penggajian yang bertanggungjawab atas pengelolaan gaji bagi semua pegawai melakukan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan kebenaran yang dibuktikan dengan adanya bukti dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan penggajian yang juga sudah disetujui oleh kepala bagian keuangan dan telah dibuktikan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan salah satu pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, Ibu Hastura selaku pegawai mengatakan bahwa:

“iya gaji yang saya terima dan yang tertulis di tabel gaji pegawai sudah sesuai tidak ada yang dlebihkan maupun dikurangi”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan narsumber diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan sudah menerapkan prinsip kebenaran dalam

⁷⁹Husna Amir, Bendahara Penggajian, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 03 November 2022

⁸⁰ Hastura, Staff Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 07 Februari 2023

memberikan gaji kepada pegawai, gaji yang diterima pegawai dengan yang tertulis di tabel besaran gaji masing-masing pegawai sudah sesuai.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu sovie selaku pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare terkait penerapan prinsip kebenaran,Apakah Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah menerapkan prinsip kebenaran dalam memberikan gaji kepada pegawai, Ibu Sovie mengatakan bahwa:

“gaji yang kami terima memang sesuai dengan yang tertulis di tabel gaji kan kami menerima gaji langsung dari BUD sedangkan bendahara gaji disini hanya membuat rekapitulasi gaji yang akan dibayarkan kepada semua pegawai jadi kalau berdasarkan tabel gaji, gaji yang saya terima sudah sesuai”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Parepare menerapkan prinsip kebenaran dalam pemberian gaji kepada semua pegawai, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian gaji yang tertulis di tabel gaji dengan yang diterima oleh pegawai.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Khaerana Supardi terkait penerapan prinsip kebenaran, apakah Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah menerapkan prinsip kebenaran dalam memberikan gaji kepada pegawai, ibu Khaerana Mengatakan bahwa:

“ ya gaji yang saya terima memang sudah sesuai dengan yang seharusnya, sudah sesuai dengan yang ada di daftar gaji pegawai”⁸²

⁸¹ Sovie De Buck, Staff Dinas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare Parepare, 07 Februari 2023.

⁸² Khaerana Supardi, Pegawai inas Perdagangan Kota Parepare, Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare, 07 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa gaji yang diterima pegawai dalam hal ini ibu Khaerana Supardi sudah sesuai dengan yang seharusnya diterima dan juga sudah sesuai dengan yang tertulis di daftar gaji pegawai.

Berdasarkan ddari hasil wawancara diatas dengan beberapa narasumber didapatkan jawaban yang hamper serupa, dimana dalam pemberian gaji kepada pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare sudah menerapkan prinsip kebenaran hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa jawaban dari narasumber selaku pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare yang keseluruhan jawabannya hamper sama mengatakan bahwa gaji yang diteria sudah sesuai dengan yang seharusnya dan sudah sesuai dengan yang ada di daftar gaji pegawai.

Prinsip kebenaran ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Anfal/8:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

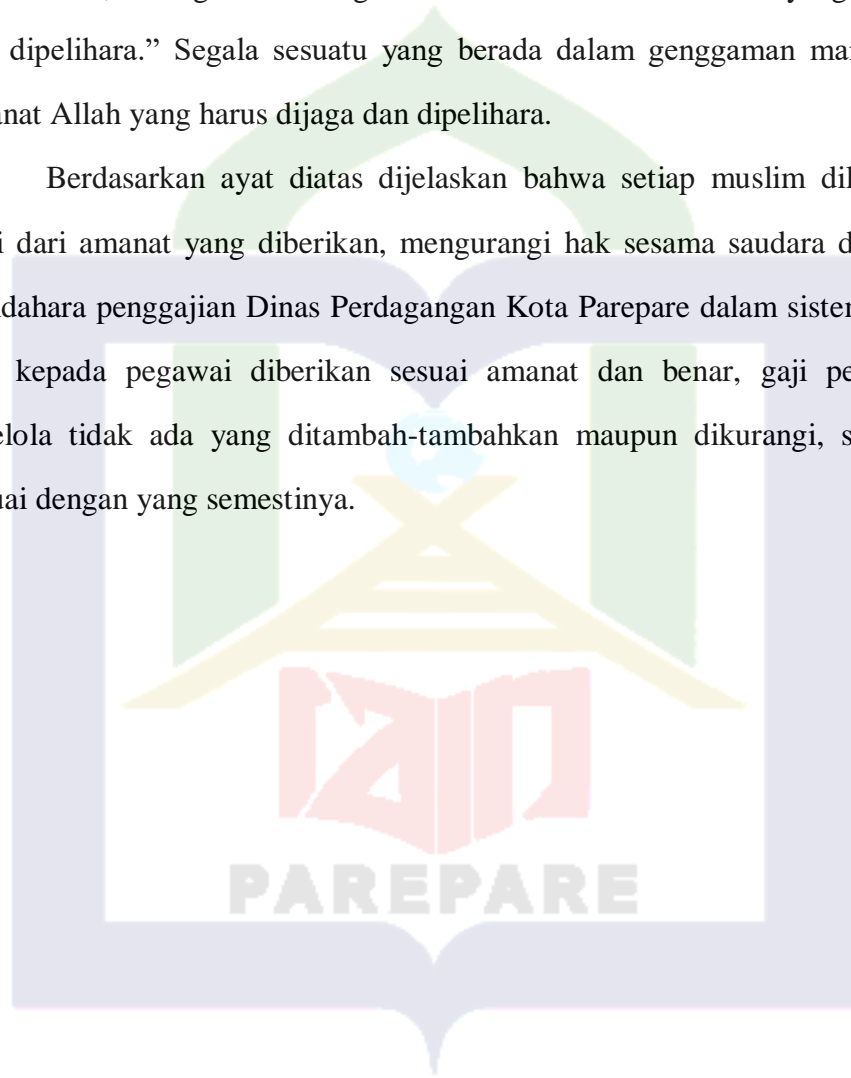
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁸³

Bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah. Tidak bersyukur berarti mengkhianati nikmat tersebut dari Pemberinya, karena itu Allah menyatakan, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga mengkufurinya atau tidak mensyukurinya, dan juga jangan mengkhianati Rasul,

⁸³Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), h.180.

yakni Nabi Muhammad, tetapi penuhlah seruannya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu oleh siapa pun, baik amanat itu adalah amanat orang lain maupun keluarga; seperti istri dan anak, muslim atau non-muslim, sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga dan dipelihara.” Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah yang harus dijaga dan dipelihara.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa setiap muslim dilarang untuk lalai dari amanat yang diberikan, mengurangi hak sesama saudara dalam hal ini Bendahara penggajian Dinas Perdagangan Kota Parepare dalam sistem pemberian gaji kepada pegawai diberikan sesuai amanat dan benar, gaji pegawai yang dikelola tidak ada yang ditambah-tambahkan maupun dikurangi, semua sudah sesuai dengan yang semestinya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

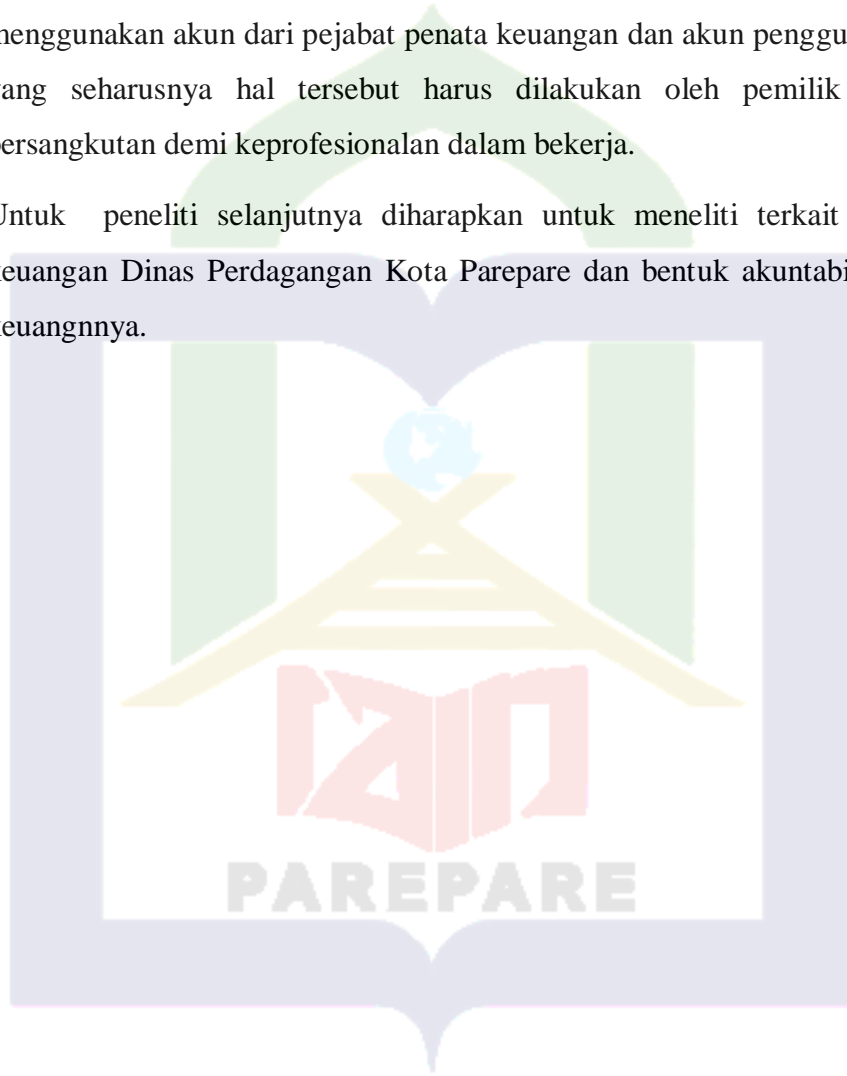
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare telah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya program pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare terkait penggajian dengan memberikan pelatihan kepada pegawai dalam menggunakan aplikasi sistem pengelolaan gaji. Kelompok target dalam program yang penggajian yaitu seluruh Pegawai di Dinas Perdagangan Kota Parepare sebanyak 42 orang. Sistem penggajian yang digunakan di Dinas Perdagangan Kota Parepare adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penggunaan aplikasi ini untuk mengikuti anjuran dari kementerian dalam negeri tentang penggunaan aplikasi SIPD untuk seluruh badan pemerintah daerah. Penerimaan gaji seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare diterima melalui Bendahara Umum Daerah, bendahara penggajian hanya melakukan input data pegawai disertai dengan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan.
2. Hasil penelitian menunjukkan sistem akuntansi penggajian telah diterapkan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Ketiga prinsip tersebut telah diterapkan dalam proses penggajian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Pada proses penggajian bendahara gaji melakukan rangkap tugas dengan menggunakan akun dari pejabat penata keuangan dan akun pengguna anggaran, yang seharusnya hal tersebut harus dilakukan oleh pemilik akun yang bersangkutan demi keprofesionalan dalam bekerja.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti terkait pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan Kota Parepare dan bentuk akuntabilitas laporan keuangannya.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Qur'an Al- Karim

Anggraeni, Elisabet Yunaeti dan Rita Irviani, *Pengantar Sistem Informasi* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Darmalaksana, Wahyudin, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*, Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati: Bandung, 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2015), h.44.

Dimiyati, Muhammad, *Metode Penelitian Untuk Semua Generasi*, Jakarta UI Publishing, 2022.

H. Bodnar, George dan William S. Hopwood, 2000, *Sistem Informasi Akuntansi, Buku Satu* (Jakarta : Salemba Empat, 2000).

Hall, J.A. 2007. *Accounting Information Sistem*. Jakarta: Salemba Empat.

Hall A. James, 2001, *Accounting Information System* Jakarta : Salemba Empat

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hery, *Intisari Konsep Dasar Akuntansi*, Jakarta: PT Grasindo, 2019.

IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Kasiram, Moh, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.

Kurniawan, Taufan Adi, *Sistem Informasi Akuntansi Dengan Pendekatan Simulasi* Jakarta: CV Budi Utama, 2020.

Mahatmyo, Atyanto, 2014 *Sistem Infomrasi Akuntansi* Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Marina, Anna dkk, 2017, *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*, Surabaya: UMSurabaya Publishing.

- Moleong, Lexi J. , *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* ,Jakarta: Salemba Empat,2016.
- Muslihudin, Muhammad dan Oktafianto, *Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*, Yogyakarta: CV. Andi Offset,2016.
- Roney, Marshal B. dan Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketigabelas*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Widoyoko, Eko Putra, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Zamzami, Faiz , *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Referensi Jurnal/Skirpsi

- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pengembangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. *Analisis Pengembangan Pasar Rakyat*. Jakarta: Kemendag.
- Fitria, Nola. (2007). Aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan pada koperasi Kopma UGM. Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi bisnis Islam. IAIN Surakarta.
- F. Baramuli., S.S. Pangemanan. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Yamaha Bima Motor Toli-Toli*, Jurnal EMBA, Vol 3, No.3, Tahun 2015
- Grande, Elena Urquia. 2011. The Impact of Accounting Information Systems (AIS) on Performance measures: Empirical evidence in Spanish SMEs1. The International Journal of Digital Accounting Research, 11 (2), pp: 25-43.
- Handojo, Andreas., Maharsi, Sri., dan Aquaria Go Ornella. 2004. Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi Atas Siklus Pembelian Dan Penjualan

Pada CV.X. Jurnal Informatika 5(2), pp:86-94.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2013 . Peraturan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jakarta: Mendag RI

Paulus, Ansy, *Fungsi Sistem Informasi Akuntansi atas Pengendalian Internal Pendapatan*, Jurnal EMBA Vol 4 No. 4 Tahun 2016.

Sundari, Yani, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Kerta Gaja Pusaka Medan, 2017.

Susilowati, Lantip, *Tanggung Jawab, Keadilan, Dan Kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal An-Nisbah Vol. 03, No.02, April 2017, h.303-305.

Referensi Wawancara

Sabir, Kasubag. Administrasi dan Umum, 03 November 2022

Husna Amir, Bendahara Penggajian, 03 November 2022

Nur zamzam, Bendahara Pengeluaran, 15 November 2022

Nirmala M, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, 07 Februari 2023

Khaerana Supardi, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, 07 Februari 2023

Hastura, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, 07 Februari 2023

Sovie De Buck, Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, 07 Februari 2023

LAMPIRAN



Lampiran 1. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : SISKA ANGGRAINI
 NIM : 18.2800.014
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
 PENGGAJIAN PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE:
 PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

Wawancara Untuk Pihak Dinas Perdagangan Kota Parepare

A. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

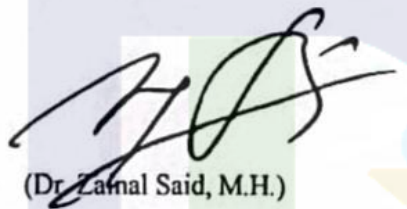
1. Adakah program yang dilakukan terkait dengan penggajian?
2. Siapa yang menjadi target atau sasaran dari program tersebut?
3. Siapa saja penanggungjawab dalam pelaksanaan penggajian?
4. Kapan gaji karyawan Dinas Perdagangan Kota Parepare dibayarkan?
5. Selama ini apakah pernah terjadi kesalahan atau keterlambatan pembayaran gaji karyawan?
6. Fungsi apa saja yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian di Dinas Perdagangan Kota Parepare?
7. Dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian di Dinas Perdagangan Kota Parepare?
8. Apa saja catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian?
9. Bagaimana proses penggajian di Dinas Perdagangan Kota Parepare?
10. Apakah di Dinas Perdagangan Kota Parepare mengimplementasikan prinsip akuntansi syariah dalam proses pemberian penggajian?
11. Apakah selama ini gaji yang diterima sesuai dengan semestinya?
12. Apakah gaji yang diterima oleh pegawai itu sudah diberikan secara adil?

13. Apakah benar gaji yang diterima sesuai dengan yang ada dilaporan rekapitulasi gaji pegawai?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Zainal Said, M.H.)

NIP. 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping



(Abdul Hamid, S.E., M.M.)

NIP. 19720929 200801 1 012



PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SISKA ANGGRAINI
N I M : 18.2800.014
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENERAPAN PSAK 103 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KOTA PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA DINAS

PERDAGANGAN KOTA PAREPARE: PERPEKTIF KEUANGAN SYARIAH

dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.

Abdul Hamid, S.E., M.M.

Dekan

Muzdalfah Muhammadun

Lampiran 2. Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4914/In.39.8/PP.00.9/010/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SISKI ANGGRAINI
 Tempat/ Tgl. Lahir : SEI KARANG, 2 MARET 2001
 NIM : 18.2800.014
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
 KEUANGAN SYARIAH
 Semester : IX (SEMBILAN)
 Alamat : KECAMATAN DUAMPANUA, KELURAHAN BARANTI,
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA DINAS PERDAGANGAN
 KOTA PAREPARE:PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.
 Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 Oktober 2022
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun

Lampiran 3. Izin Penelitian dari Dinas Permodalan Kota Parepare

SRN IP0000776



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 776/IP/DPM-PTSP/10/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : SISKA ANGGRAINI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

ALAMAT : **JL. POROS PINRANG, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE : PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**


LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Oktober 2022 s.d 20 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **20 Oktober 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
 Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Telp. (0421) 21426, Fax (0421) 28132
 Kode Pos 91122, e-mail : dinas.perdagangan.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 800/1255/ Perdagangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prasetyo Catur.K.SH,M.Si
 N i p : 19731013 200604 1 003
 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
 Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare

MENERANGKAN

N a m a : SISKANGGRAINI
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Alamat : Jl. Poros Pinrang, Kec. Baranti, Kab. Sidrap
 Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**
 Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di Dinas Perdagangan Kota Parepare guna menyelesaikan Skripsi dengan judul :

“PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE : PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 15 Desember 2022



PRASETYO CATUR.K. SH, M.SI
 Pembina, IV/a
 : 19731013 200604 1 003

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabir Zainuddin
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : PNS (Kebubag adm umum)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SISKI ANGGRAINI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


(..... Sabir Zainuddin)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *NURZAMZAM*

Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*

Umur : *42 TAHUN*

Pekerjaan : *BENDAHARA PENGELUARAN*


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SISKI ANGGRAINI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan


(*NURZAMZAM SE*.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnah Amir, SE, M.Si.
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 46 Thn
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SISKHA ANGGRAINI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan

(...Husnah Amir, SE, M.Si....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOVIE DE BUCK, SH
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Umur : 30 THN
 Pekerjaan : NON-ASN DINAS PERDAGANGAN ADMINISTRASI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SISKI ANGGRAINI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
 Yang Bersangkutan

SOVIE
 (...SOVIE DE BUCK, SH...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hastira -SE
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 40 thn
Pekerjaan : Staf Dinas perdagangan Parepare

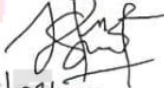
Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SISKI ANGGRAINI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan


(.....Hastira.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **KHAERANA SUPARDI**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Umur : **30**
Pekerjaan : **Pegawai Dinas Perdagangan**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SISKI ANGGRAINI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

**“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas
Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


(.KHAERANA SUPARDI...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIRMALA M
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SISKI ANGGRAINI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Parepare: Perspektif Keuangan Syariah”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan



(.NIRMALA M.....)

PAREPARE

Lampiran 6. Daftar Gaji Pegawai Bulan Oktober 2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**DAFTAR
GAJI DSB. UNTUK PARA PEGAWAI
GOLONGAN I, II, III DAN IV
DINAS PERDAGANGAN
BULAN OKTOBER 2022**

GAJI INDIK				
PENGHASILAN				
01. GAJI POKOK	Rp.			
02. TUNJANGAN ISTRI	Rp.			
03. TUNJANGAN ANAK	Rp.	142.260.560		
04. TUNJANGAN PERB. PENGHASILAN	Rp.	9.065.164		
05. TUNJANGAN STRUKTURAL	Rp.	3.207.097		
06. TUNJANGAN FUNGSIONAL	Rp.	0		
07. TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	Rp.	11.035.000		
08. JAMINAN KESEHATAN 4%	Rp.	1.920.000		
09. TUNJANGAN BERAS	Rp.	4.790.000		
10. TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH	Rp.	8.473.140		
11. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL	Rp.	0		
12. TUNJANGAN Pph PASAL 21	Rp.	0		
13. TUNJANGAN JKK	Rp.	192.968		
14. TUNJANGAN JKM	Rp.	0		
15. TUNJANGAN TAPERPA PK	Rp.	0		
16. PEMBULATAN	Rp.	2.244		
JUMLAH KOTOR	Rp.	180.746.173		
POTONGAN :				
01. IURAN WAJIB (IWP 1%)	Rp.	1.720.778		
02. IURAN WAJIB (IWP 8%)	Rp.	12.346.627		
03. Pph PASAL 21	Rp.	192.968		
04. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp.	0		
05. POTONGAN BULOG	Rp.	0		
06. POTONGAN ASKES	Rp.	0		
07. POTONGAN LAIN2	Rp.	0		
08. POTONGAN SEWA RUMAH	Rp.	0		
09. POTONGAN JKK	Rp.	0		
10. POTONGAN JKM	Rp.	0		
11. POTONGAN TAPERPA PK	Rp.	0		
12. POTONGAN TAPERPA PEGAWAI	Rp.	0		
JUMLAH POTONGAN	Rp.	14.260.373		
JUMLAH BERSIH	Rp.	166.485.800		

GOL	PEGAWAI	ISTRI	ANAK	JML. JIWA
IV	4	2	2	8
III	34	22	40	96
II	4	3	6	13
I	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	42	27	48	117

Lampiran
Harap SP2D Diberikan Atas Nama
BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PERDAGANGAN

PAREPARE, 19 SEPTEMBER 2022
PEMBAUT DAFTAR GAJI
HUSNAH AMIR, SE
NIP. 197608062010012013

BENDAHARA PENGELUARAN
NURZAMZAM, SE
NIP. 198003202014092005

MENGETAHUI/MENYETUJUI,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PRASETYO CATI HUSNASTAN, SH
NIP. 1973101320010003

Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah
Ruang ini disediakan untuk catatan di tempat pembayaran SPM

**REKAPITULASI GAJI PNS/OPS PER GOLONGAN
Bulan 2022
DINAS PERDAGANGAN**

JENIS GAJI	GAJI INDIK	JUMLAH PEGAWAI	GAJI POKOK	TUNJ. ISTRI	TUNJ. ANAK	TUNJ. STRUKTURAL	TUNJ. FUNGSIONAL	TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. UMUM	TUNJ. TERPENCIL	TUNJ. BERAS	TUNJ. PAJAK	TUNJ. JKK	TUNJ. JKM	TAPERPA PK	PEMBULATAN	JM. KOTING	POT. BULOG	POT. SEWA RUMAH	POT. JKK	POT. JKM	TAPERPA PK TAPERPA PEGAWAI	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERANGAN	
GOLONGAN V		2	17.483.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GOLONGAN IV		2	166.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.870.600	
GOLONGAN III		34	113.246.560	5.740.000	4.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.812.800	
GOLONGAN II		6	11.331.709	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.052.400	
GOLONGAN I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PERSATKER		42	142.260.560	11.035.000	4.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.485.800	

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PRASETYO CATI HUSNASTAN, SH
NIP. 1973101320010003

BENDAHARA PENGELUARAN
NURZAMZAM, SE
NIP. 198003202014092005

HUSNAH AMIR, SE
NIP. 197608062010012013

PAREPARE, 19 SEPTEMBER 2022
PEMBAUT DAFTAR GAJI

Lampiran 8. Dokumentasi



(Wawancara dengan Ibu Husna Amir, S.E di Dinas Perdagangan Kota Parepare pada Tanggal 03 November 2022)



(Wawancara dengan Ibu Nur Zamzam di Dinas Perdagangan Kota Parepare pada Tanggal 03 November 2022)



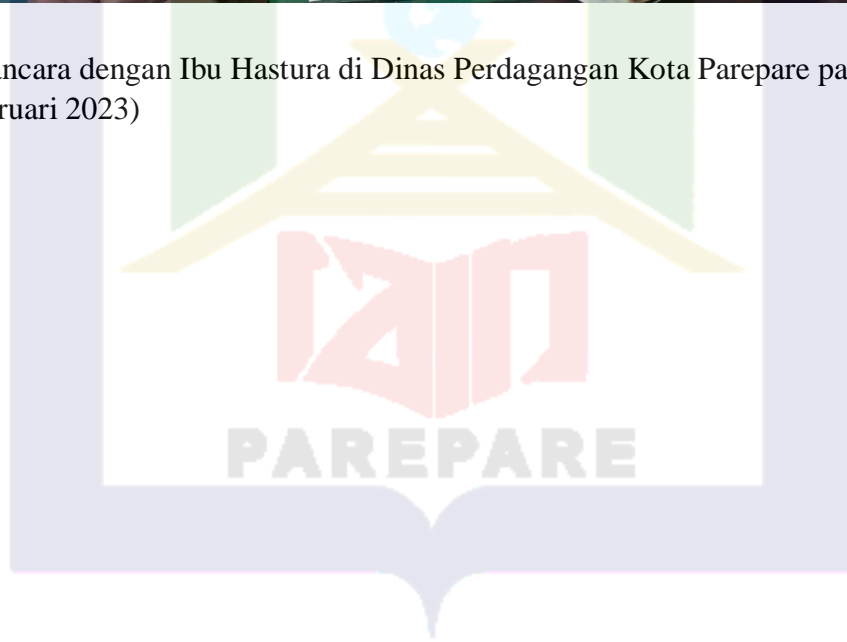
(Wawancara dengan Ibu Khaerana Supardi di Dinas Perdagangan Kota Parepare pada Tanggal 07 Februari 2023)



(Wawancara dengan Ibu Shovie De Buck di Dinas Perdagangan Kota Parepare pada Tanggal 07 Februari 2023)



(Wawancara dengan Ibu Hastura di Dinas Perdagangan Kota Parepare pada Tanggal 07 Februari 2023)



Lampiran 9 : Biodata Penulis



Siska Anggraini Lahir pada tanggal 2 Maret 2001, di Sei Karang, Sumatera Selatan. Anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari Bapak Jajang Ruhiyat dan Ibu Endang Wuryanti. Penulis pernah bersekolah di SD Negeri 7 Baranti dan lulus pada tahun 2012. Lalu melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 1 Baranti dan lulus di tahun 2015.

Kemudian melanjutkan kembali pendidikan di SMK Negeri 2 Sidrap dan lulus di tahun 2018. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare. Selain proses belajar dan mencari ilmu bukan hanya dilakukan dalam proses perkuliahan. Sehingga penulis berinisiatif untuk bergelut di beberapa Organisasi Intra Kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM).